



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020-2024

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang bertujuan untuk penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 5), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Untuk penambahan tematik reformasi birokrasi pada tahun berikutnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 22 Februari 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 22 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
MERANTI NOMOR TAHUN 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020-
2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara Nasional Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak Tahun 2010. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun *Road Map* RB tahun 2020-2024. Dalam *Road Map* ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan penyesuaian *Road Map* RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi dalam melaksanakan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus berperan aktif dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah Internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebabakibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai.

Secara umum, *Road Map* RB sebelum penyesuaian yang dapat disebut dengan RB general yakni reformasi birokrasi yang berfokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi. Dalam mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengagendakan reformasi birokrasi pada *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebelum penyesuaian mencakup 8 (delapan) Program area perubahan yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Setelah dilakukan penajaman, *Road Map* RB berfokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Pemerintah telah merumuskan RB Tematik untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir. RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu : Pengentasan kemiskinan, Peningkatan investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan serta Percepatan prioritas Aktual Presiden.

Pada *Road Map* RB setelah penajaman, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan 2 (dua) dari 4 Tematik yang telah ditentukan yaitu : Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Meranti diharapkan meningkatkan profesionalisme SDM, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja sehingga keberadaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

BAB I PENDAHULU AN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu **mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*)**. Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015- 2019, dan 2020-2024. Pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang berkualitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*).

Namun, walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat seperti pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, percepatan perizinan, penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga perlu dibangun suatu konsep reformasi birokrasi yang berdampak nyata dan berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga sebagai keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sebagaimana hal yang diuraikan diatas juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sejak dilaksanakannya implementasi reformasi birokrasi pada tahun 2019 yang lalu.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentang reformasi birokrasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi pada tahap selanjutnya, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan. Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu melakukan perbaikan dan penajaman dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang

berkepentingan dengan target *outcome* yang lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

1.2. Peraturan Perundang-Undangan

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024, diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026; dan
- 13) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.3. Tujuan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi

Pada hakikatnya, *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu :

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi; Capaian reformasi birokrasi pada periode *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebelum

penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola terdapat peningkatan, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat. Melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda pembangunan daerah terutama dalam hal perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;

Penajaman *Road Map* bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi dilapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala lokal, regional maupun nasional juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi dalam menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/Lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian visi dan misi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Meranti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat

berkomitmen terhadap

pencapaian sasaran reformasi birokrasi dan telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan **Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin diwujudkan pada periode Tahun 2021-2026 yakni “ Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia ”**. Dalam penjabarannya, visi tersebut dituangkan kedalam 6 (enam) misi. Tata kelola pemerintahan yang baik masuk dalam misi ke 6 (enam) yaitu “ Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih dan Bertanggungjawab Serta Memberikan Layanan Prima ”.

Gambaran umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, dari hasil penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2022

No	Indikator Penilaian		Bobot	2020		2021		2022	
				Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pengungkit								
	I.	Pemenuhan	20,00	7,34	36,7	8,38	41,9	10,40	52
	II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,55	55,5	5,01	50,1	4,87	48,7
	III	Reform	30,00	2,09	6,96	2,73	9,1	6,28	20,9
		Total Pengungkit (A)	60,00	18,66	31,1	16,12	26,86	21,55	35,91
B	Hasil								
	I.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10)	10,00	7,72	77,2	7,76	77,6	7,83	78,3
	II.	Kualitas Pelayanan Publik (10)	10,00	9,28	92,8	8,67	86,7	7,39	73,9
	III	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (10)	10,00	9,50	95	7,72	77,2	8,26	82,6
	IV	Kinerja Organisasi (10)	10,00	5,49	54,9	6,73	67,3	5,60	56
		Total Hasil (B)	40,00	31,99	79,97	30,88	77,2	29,08	72,7
		Indeks RB (A)+(B)	100,00	46,97		47,00		50,63	
		Predikat		C		C		CC	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi dari KEMENPAN RB

Tabel 2.2 Hasil Antara Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Kategori	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	-	-	114,50	Buruk	KASN
2.	ASN yang Profesional	0-100	57,00	52,92	49,36	Sangat Rendah	BKN
3.	Implementasi SPBE	0-5	-	1,19	2,12	Cukup	KEPMENPA NRB
4.	Kualitas Pengelolaan PBJ	0-100	40,00	30,73	29,50	Kurang	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	2,80	3,10		KEPMENPA NRB

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Kategori	Sumber Data
6.	Maturitas SPIP	0-5	3,16	3,00	3,00	Terdefinisi	BPKP
7.	Kapabilitas APIP	0-5	3,00	3,00	3,00	<i>Delivered</i>	BPKP
8.	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	0-100	54,14	75,16	78,82	Tingkat Kepatuhan Tinggi	Ombudsman RI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	58,90	18,49	13,52	Sangat Kurang	ANRI

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa Indeks RB Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti mampu meningkatkan indeks RB dengan mendapatkan predikat CC. Pada aspek “antara’ nilai RB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan sejumlah program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih terdapat program reformasi birokrasi yang belum berjalan dengan optimal, ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, sehingga perlunya penyempurnaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dari Tabel 2.2 dapat diketahui terdapat 3 (tiga) indikator yang mengalami penurunan selama periode 2020-2024 yaitu **ASN yang Profesional, Kualitas Pengelolaan PBJ, dan Kualitas Pengelolaan Arsip.**

2.2 Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

1) Isu strategis di Tingkat Hulu

Beberapa isu strategis di tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan hasil antara area perubahan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3 Isu Strategis tingkat hulu pada pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan hasil antara area perubahan reformasi birokrasi

No.	Hasil Antara	Isu Strategis
	Sistem Merit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme sistem kerja baru yang belum terimplementasi dengan baik; 2. Penempatan, mutasi dan promosi pegawai umumnya belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan; 3. Basis data (database) kepegawaian yang ada belum terintegrasi dan berfungsi secara optimal, khususnya untuk keperluan pengambilan keputusan oleh pimpinan; 4. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun; 5. Pemberian reward and punishment terhadap disiplin dan prestasi kerja

		<p>pegawai belum optimal; dan</p> <p>6. Dalam upaya untuk melaksanakan sistem merit, telah dilaksanakan assessment kepada pegawai, namun hanya pada level pimpinan perangkat daerah. Disamping itu disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang belum menggambarkan logical framework yang baik untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.</p>
	ASN yang profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas sumber daya aparatur yang belum optimal; 2. Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki performa dan kompetensi tinggi masih terbatas; 3. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal; dan 4. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.

No.	Hasil Antara	Isu Strategis
3.	Implementasi SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan tata kelola SPBE (<i>e-government</i>) belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum maksimal, khususnya integrasi antar sistem yang ada pada masing- masing perangkat daerah 2. Belum dibangun arsitektur SPBE yang baik; 3. Belum dibangun infrastruktur dan konektivitas TIK yang aman dan andal ; dan 4. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE belum terlaksana.
4.	Kualitas Pengelolaan PBJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik belum optimal; 2. Kualitas dan kuantitas aparatur Pengadaan barang dan jasa belum maksimal; 3. Belum optimalnya pemanfaatan belanja langsung, walaupun rasio belanja langsung terhadap total APBD mengalami peningkatan. Pemanfaatan belanja langsung terutama untuk belanja modal secara otomatis akan berpengaruh terhadap penyediaan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dapat menstimulus peningkatan produksi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5.	Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan publik digital yang belum terintegrasi dan optimal; 2. Belum ada kebijakan sistem sanksi/reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Selain itu, upaya belum maksimal dalam monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat; 3. Belum seluruhnya unit pelayanan yang ada memiliki dan menerapkan standar pelayanan, yang mencakup kepastian dalam hal prosedur persyaratan, biaya dan waktu; 4. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk unit pelayanan publik; 5. Kompetensi petugas pelayanan belum merata; dan 6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

6.	Maturitas SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal ; 3. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal; 4. Kebijakan pengawasan internal yang disusun telah dilakukan sosialisasi terhadap seluruh pegawai, namun belum ada monitoring dan evaluasi secara berkala untuk diketahui tingkat kepatuhan atas kebijakan tersebut; 5. Pembangunan Zona Integritas (ZI) telah dilakukan sebagai upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, namun belum ada Unit kerja/ Perangkat Daerah yang memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 6. Kualitas pengelolaan Prioritas Kabupaten bidang Perencanaan, Penganggaran serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang belum baik; 7. Pelaksanaan perencanaan yang belum inovatif dan inklusif (evidence based planning);
7.	Kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. APIP yang belum mendapatkan kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern;
8.	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik kurang memadai; 2. Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki performa dan kompetensi tinggi masih terbatas; 3. Pengelolaan pengaduan belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!

No.	Hasil Antara	Isu Strategis
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum optimal; 2. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti belum menyusun dan menetapkan Kebijakan Penerapan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) yang berlaku di lingkungannya; 3. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti belum menyusun dan menetapkan Kebijakan Alih Media; 4. Belum dibangun layanan Jaringan Informasi Kearsipan; 5. Belum terdapat Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI); 6. Belum terlaksananya penataan arsip inaktif dikarenakan belum tersedia depot arsip; 7. Belum melaksanakan penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah oleh Lembaga Kearsipan Daerah; 8. Kualitas dan kuantitas Aparatur Arsiparis yang belum terpenuhi; dan 9. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan dan penyimpanan arsip masih terbatas.

2) Isu strategis di Tingkat Hilir;

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

Tabel. 2.3 Isu Strategis tingkat hilir pada pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Tematik	Isu Strategis
1.	Pengentasan Kemiskinan	<p>Masih tingginya angka penduduk miskin secara relative sebesar 25.23% atau sebanyak 46.950 jiwa pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pengembangan ekonomi penduduk miskin belum dikelola secara maksimal karena belum terkoordinasi dan terintegrasinya dengan baik pengentasan kemiskinan antara <i>stakeholder</i> terkait.</p> <p>Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan</p>

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis RB Nasional

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Tujuan reformasi birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama reformasi birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir.

Kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja, yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan output kegiatan. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi sampai tahun 2024 dinyatakan pada tabel berikut:

Tabel. 2.4 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
Strategis Reformasi Birokrasi Nasional

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJ MD	Kondisi Eksisting
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks RB	Baik	Cukup Baik	Cukup
		Capaian indikator kinerja pembangunan (Angka kemiskinan)	9,71	18,71	23,84
		Capaian indikator daya saing global (EGDI)	Peringkat ke 88 dari 193 Negara	3,5	2,12

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat 3 (tiga) sasaran strategi reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis reformasi birokrasi dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel;
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.

Dari 2 (dua) sasaran strategis *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran dan prioritas kegiatan utamayang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 2.5 Sasaran dan Kegiatan Utama Pelaksanan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

Sasaran (Inmediate Outcome)	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama
Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel				
Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat Komposit 4	Penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi

Terimplementasikan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Predikat Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai
Terimplementasikan Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE pada Perangkat Daerah Baik	36 OPD	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE Tingkat Implementasi Kebijakan arsitektur SPBE

Sasaran (<i>Inmediate Outcome</i>)	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Baik	36 OPD	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP
				Indeks Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Kapabilitas APIP	Level 3	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
			Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP
			Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat LAPOR yang sudah diselesaikan
			Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Indeks Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Predikat Baik	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik
			Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum
Meningkatnya	Indeks Pengelolaan Kearsipan	Predikat Baik	Pelaksanaan Arsip Digital	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan

kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral				arsip secara digital
	Indeks Pembangunan Statistik	Predikat Baik	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat Baik	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
			Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK
				Tindak lanjut rekomendasi BPK

Sasaran (<i>Inmediate Outcome</i>)	Indikator Sasaran	Targ et Sasar an	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama
Sasaran Strategis 2 : Budaya Birokrasi Berakhlak Dengan ASN yang Profesional				
Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Perangkat Daerah yang telah mengimpleme ntasi kan kebijakan transformasi jabatan fungsional dengan Baik	36 OPD	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit
Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Perangkat Daerah yang telah mengimplemen tasi kan Manajemen talenta dengan Baik	26 OPD	Penguat an Manaje men Talanta ASN	
Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Perangkat Daerah yang telah mengimpleme ntasi kan kebijakan sistem pembelanjara n terintegrasi ASN dengan Baik	26 OPD	-	
Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	100 %	-	
Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	Tingkat implementas i platform digital ekosistem pada Perangkat Daerah	80 %	-	
Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Perangkat Daerah yang telah mengimpleme ntasi kan kebijakan pengelolaan kinerja	26 OPD	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	

	pegawai ASN dengan Baik			
Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Perangkat Daerah yang telah mengimplemen- tasi kebijakan sistem merit dan sistem manajamen ASN	26 OPD	Penguatan sistem Merit	
			Pelaksanaan Core Value ASN	Indeks BerAKHLAK
			Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik (OMBUDSMAN)

BAB III

AGENDA RB PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

3.1 Reformasi Birokrasi General

3.1.1 Penetapan Tujuan, Sasaran dan Perencanaan RB

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*).

Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan - kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Selanjutnya dalam pelaksanaan RB, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengakomodir kegiatan utama untuk pemecahan masalah tata kelola internal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penetapan prioritas dan target kegiatan utama dalam pelaksanaan RB dapat dinyatakan pada tabel berikut :

Tabel. 3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Utama
Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel						
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi
			Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai
		Transformasi digital yang belum optimal	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE pada Perangkat Daerah Baik	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE
						Tingkat Implementasi Kebijakan arsitektur SPBE
					Nilai SAKIP	

		Birokrasi yang belum kolaboratif	Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Baik	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
--	--	----------------------------------	--	--	--	--------------------------------

Tujuan	Indikator Tujuan	Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Utama
		Integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Kapabilitas APIP	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
					Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP
					Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat LAPOR yang sudah diselesaikan
					Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Indeks Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik
					Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum

		Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Indeks Pengelolaan Kearsipan	Pelaksanaan Arsip Digital	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara digital
			Indeks Pembangunan Statistik	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
		Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
				Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini Tindak lanjut rekomendasi BPK

Tujuan	Indikator Tujuan	Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Utama
Sasaran Strategis 2 : Budaya Birokrasi Berakhlak Dengan ASN yang Profesional						
		Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan transformasi jabatan fungsional dengan Baik	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit
			Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Manajemen talenta dengan Baik	Penguatan Manajemen Talenta ASN	
			Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan sistem pembelanjaran terintegrasi ASN dengan Baik	-	-

		Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	-	-
		Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	Tingkat implementasi platform digital ekosistem pada Perangkat Daerah	-	-

Tujuan	Indikator Tujuan	Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Utama
			Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN dengan Baik	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Sistem Merit
			Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan sistem merit	Indeks Sistem Merit
					Pelaksanaan Core Value ASN	Tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK
					Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik (OMBUDSMAN)

3.1.2 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.
- 2) Dimensi Instansional merupakan Kegiatan Utama inisiatif diluar dari Kegiatan Utama *mandatory* yang dapat memberikan *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dengan indikator yang terukur.

Tabel 3.2 Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Man dat RB Gener al Nasio nal	Ska la	Baseli ne	Tingkat Keparaha n (Implemen tasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Priorit as (Total Skor)
1	Penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	100	100	0.00	2	12.00
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	100	0	10.00	8	28.00
3	Pelaksanaan Arsitek tur SPBE Nasional	10	5	2.12	5.76	8	23.76
4	Pelaksanaan Siste m Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	100	68.96	3.10	10	23.10
5	Pembangunan Zo na Integritas di unit kerja	10	5	0	10.00	10	30.00
6	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	5	3	4.00	10	24.00
7	Penguatan Pengelol aan Pengaduan Masyarakat	10	100	100	0.00	10	20.00
8	Penguatan Upa ya Pencegahan Korupsi	10	100	85.57	1.44	10	21.44

9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	100	0	10.00	9	29.00
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan	10	100	0	10.00	9	29.00
11	Pelaksanaan Arsip Digital	10	100	13.52	8.65	9	27.65
12	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	5	1	8.00	8	26.00
13	Penguatan Pengadaa nBarang dan Jasa Pemerintah	10	100	29.5	7.05	1 0	27.05

No	Kegiatan Utama	Man dat RB Gener al Nasio nal	Ska la	Baseli ne	Tingkat Keparaha n (Implemen tasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Priorit as (Total Skor)
14	Penguatan Pengelol aan Keuangan dan Aset	10	100	42.60 6	5.74	1 0	25.74
15	Penataan Jabat an Fungsional	10	10	8	2.00	3	15.00
16	Penguatan Manaje men Talenta ASN	10	100	0	10.00	8	28.00
17	Pengelolaan Kinerj a Pegawai ASN	10	100	49.36	5.06	8	23.06
18	Penguatan Sistem Merit	10	400	114.5	7.14	8	25.14
19	Pelaksanaan Core Values ASN	10	100	0	10.00	8	28.00
20	Pelaksanaan Pelaya nan Publik Prima	10	100	78.82	2.12	7	19.12

3.1.3 Penetapan Target Kegiatan Utama

Target kegiatan utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selama periode 2023-2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama yang bersifat *mandatory* dan 4 (empat) kegiatan utama yang bersifat inisiatif. Target kegiatan utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Penetapan Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline (2022)	Target		Unit/Satuan Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
SS. 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel								
1	Penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	1. Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	%	100	100	100	Bagian Organisasi SETDA	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	2. Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	%	N/A	36,00	36,50	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	3. Indeks SPBE	Nilai	2,12	2,50	3,00	Diskominfotik dan Persendian	Seluruh Perangkat Daerah
		4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur	Nilai	2,30	2,50	3,00	Diskominfotik dan Persendian	Seluruh Perangkat

		SPBE						Daerah
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	5. Nilai SAKIP	Perangkat Daerah	25	30	35	Bappedalitbang	Seluruh Perangkat Daerah
		6. Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	84,4	87,96	89,80	Bappedalitbang	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline (2022)	Target		Unit/Satuan Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
5	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	7. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Jumlah Perangkat Daerah	N/A	1	2	Inspektoral Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
6	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	8. Tingkat maturitas SPIP	Level	3	1	3	Inspektoral Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
7	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	9. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat LAPOR yang sudah diselesaikan	Persentase	50	100	100	Bagian Organisasi SETDA	Seluruh Perangkat Daerah
8	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10. Survei Penilaian Integritas	Level	4,12	3,84	3,86	Inspektoral Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	11. Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	N/A	65	71	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Seluruh Peringkat Daerah
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	12. Indeks Reformasi Hukum	Indeks	N/A	65	71	Bagian Hukum SETDA	Seluruh Peringkat Daerah
11	Pelaksanaan Arsip Digital	13. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara digital	Persentase	33	60	70	DISPERSIP	Seluruh Peringkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline (2022)	Target		Unit/Satuan Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
12	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	14. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah	N/A	10	10	Diskominfotik dan Persendian	Seluruh Perangkat Daerah
13	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	15. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	29,5	31,00	33,50	Bagian PBJ SETDA	Seluruh Perangkat Daerah
14	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	16. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
		17. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Indeks	N/A	3,00	3,00	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
SS. 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional								
1	Penataan Jabatan Fungsional							

2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	18. Indeks Sistem Merit	Indeks	114,50	129,00	150,00	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN							
4	Penguatan Sistem Merit							
5	Pelaksanaan Core Values ASN	19. Indeks BerAKHLAK	Indeks	N/A	50	58	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	20. Indeks Pelayanan Publik (OMBUDSMAN)	Nilai	78,82	79,50	80,00	Bagian Organisasi SETDA	Seluruh Perangkat Daerah

3.1.4 Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi

Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Rencana aksi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di **dituangkan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.**

3.1.5 Monitoring dan Evaluasi Internal

Langkah penting selanjutnya dalam implementasi reformasi birokrasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan secara berkala pada tiap triwulanan (per tiga bulan) oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil). Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan oleh Evaluator Internal (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Tim atau unit pengelola RB tersebut perlu memastikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kualitas yang baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Meranti selanjutnya menyampaikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Nasional paling lambat akhir Oktober melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.

3.2 Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit reformasi birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

3.2.1 Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik

Langkah awal dalam pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan fokus reformasi birokrasi tematik pada tahun berjalan. Dalam menetapkan tema, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berangkat dari *evidence*

berupa data yang kuat dan relevan (*evidence based policy*). Data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang digunakan sebagai dasar penetapan tema. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, yaitu :

- 1) **Pengentasan Kemiskinan.** Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- 2) **Peningkatan Investasi.** Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- 3) **Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.** Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
- 4) **Percepatan Prioritas Aktual Presiden.** Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Tabel 3.4 Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik Berdasarkan Skala

No.	Tema / Target Tahunan	Sasaran Tematik	Indikator	Satuan	Baseline / Kondisi Eksisting	Target		Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keperluan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
					2022	2023	2024						
1	Penurunan Angkat Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	23,84	23,05	22,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	45,00
2	Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Investasi	Milyar	217,98	250,00	300,00	10,00	6,00	9,00	7,00	7,00	39,00
		Meningkatnya kecepatan penerbitan izin usaha baru	Waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin usaha baru	Hari	5 s/d 6	5	5	7,00	6,00	8,00	8,00	7,00	36,00
3	Digitalisasi Administrasi	Peringkat (Menurunnya prevalensi stunting)	Peringkat (Prevalensi Stunting)	%	17,50	16,00	14,00	8,00	8,00	10,00	7,00	9,00	42,00

	Pemerintahan	Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Nilai	2,12	2,50	3,00	10,00	8,00	6,00	5,00	8,00	37,00
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	28,46	40,00	50,00	5,00	7,00	5,00	9,00	8,00	34,00
5	Pengendalian Tingkat Inflasi	Terkendalnya tingkat inflasi	Tingkat Inflasi	%	N/A	N/A	N/A	5,00	5,00	9,00	6,00	7,00	32,00

Berdasarkan analisis data pada Tabel 3.4 diatas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memilih tema **Pengentasan Kemiskinan** dengan membandingkan Kondisi Eksisting.

Tabel 3.5 Penetapan Tema Pengentasan Kemiskinan dengan membandingkan Kondisi Eksisting

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base line	Target	
				2022	2023	2024
1	Pengentasan Kemiskinan	Percepatan penanggulangan kemiskinan	Angka Kemiskinan	23,84	23,05	22,00

Dalam memilih tema tersebut juga dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Faktor Kesesuaian dengan Prioritas Pemerintah Daerah

Faktor kesesuaian diartikan sebagai upaya K/L/D untuk menemukan kesesuaian tema yang dipilih berdasar kondisi prioritas dan data eksisting yang dimiliki. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kesesuaian dengan meninjau prioritas pembangunan daerah atau tupoksi utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang ada pada dokumen RPJMD. Artinya suatu tema menjadi masalah khusus dan memperoleh perhatian sehingga dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Faktor Keparahan Masalah

Urgensi penyelesaian masalah yang menjadi tupoksi K/L/D menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan tema RB Tematik. **Pengentasan kemiskinan** merupakan tema yang dipilih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dianggap telah mencapai tahap krisis dan tidak dapat diabaikan.

3. Faktor Dampak terhadap Ekonomi/Kesejahteraan Masyarakat

Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor utama penentu pemilihan tema Reformasi Birokrasi Tematik. Hal ini dikarenakan, apabila tema tersebut tidak dipilih maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak negatif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila tema itu dipilih, maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak positif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4. Faktor Potensi

Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor utama penentu pemilihan tema Reformasi Birokrasi Tematik. Hal ini dikarenakan, apabila tema tersebut tidak dipilih maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak negatif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila tema itu dipilih, maka akan mempengaruhi secara signifikan

berupa dampak positif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

5. Faktor Percepatan Kinerja

Percepatan Kinerja K/L/D dalam pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi menjadi faktor utama lainnya dalam pemilihan tema Reformasi Birokrasi Tematik. Artinya bahwa ketika ditemukan kondisi yang tidak signifikan negatif pada data yang ada, maka instansi dapat memilih tema yang masih memerlukan percepatan intervensi agar memperoleh hasil kinerja yang lebih optimal.

3.2.2 Identifikasi Masalah (*Bottleneck*) Tema Reformasi Birokrasi

Tematik Sustainable Development Goals (SDG's) dengan 17

tujuan utama dan salah

satu tujuan utamanya adalah penanggulangan kemiskinan. Kemajuan yang dicapai Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan kemiskinan selaras dengan capaian SDG's 2020 dengan pencapaian sebesar 25,28%. Meski pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berhasil menurunkan kemiskinan, namun perlu diperhatikan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Tetapi bagaimana mengeluarkan penduduk miskin tersebut dari kelompok penduduk miskin.

Walaupun mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan tetapi masih jauh di atas tingkat kemiskinan rata-rata provinsi Riau sebanyak empat kali lebih tinggi dan masih yang tertinggi di semua indikator kemiskinan dari 12 kabupaten kota di provinsi Riau. Oleh karena itu program pembangunan yang lebih fokus dan lokus terutama pada perbaikan variabel determinan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar serta penyediaan pangan yang berkualitas harus menjadi perhatian utama.

Perkembangan jumlah penduduk miskin kabupaten Kepulauan Meranti selama periode 2010-2020 tumbuh negative sebesar -4,43% per tahun. Jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 75,00 ribu jiwa kemudian berkurang menjadi 47,10 ribu jiwa pada tahun 2020 atau berkurang sebanyak 27,90 ribu jiwa. Kemampuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh kecepatan dalam strategi penurunan jumlah penduduk miskin secara relative berpacu dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tumbuh sebesar 1,73% per tahun. Oleh karena itu upaya pengurangan jumlah penduduk miskin memerlukan rencana yang tepat dan akurat terutama terkait dengan data kependudukan.

3.2.3 Penetapan Kinerja/ *Log Frame* Tema Pengentasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi Tematik

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menargetkan angka kemiskinan terus menurun, hingga mencapai kisaran 18,90 pada tahun 2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun penetapan kinerja yang didasarkan pada *logical framework*. Penetapan kinerja ini akan menjadi landasan operasional dan acuan bagi Pemerintah TKPKD, masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam mengentaskan kemiskinan secara sinergis di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penetapan kinerja Tematik Pengentasan Kemiskinan, dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 3.1 Penetapan Kinerja/ Log Frame Tema Pengentasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023

Final Outcome	KEMISKINAN													
	Angka Kemiskinan													
	Target 2023 : 23,02													
Strategi	1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat													
Intermediate Outcome	Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS								Meningkatnya Pemenuhan atas Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang Berkualitas	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN KESETERAPAN UMUM DAN KETERTRAMAN MASYARAKAT
	Persentase PPKS yang Tertangani								Indeks Kesehatan	Indeks Pendidikan	Tingkat Pengangguran	Pengeluaran Perkapita	Tingkat penyelesaian KS	
	Target : 85%								Target : 74,25	Target : 62	Target : 6,30 %	Target: 8.150.000	Target : 83 %	
Immediate Outcome	Melakukan Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS	Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada KPM	Melakukan Pemberdayaan Sosial kepada PPKS dan KAT	Memberikan Bantuan Sosial kepada Korban Bencana	Menyediakan Pelayanan Pendaftaran dokumen Kependudukan Kepada PPKS	Menyediakan Pelayanan Pencatatan Sipil kepada PPKS	Melakukan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Memberikan Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan secara Komprehensif	Menyediakan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terintegrasi dan merata	Menyediakan Akses Layanan Pendidikan Di Desa/Kelurahan Rentan Kemiskinan	Membina Hubungan Industrial	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Utama Masyarakat	Melakukan Panangulangan Bencana bagi Desa/Kelurahan	Melakukan Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Permukiman Layak Huni bagi
	Jumlah PPKS yang tertata dan Dirahabiltasi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah masyarakat PPKS dan KAT yang ditangani	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Cakupan Pelayanan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Cakupan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perencanaan dan Masyarakat yang Terintegrasi dan Merata	Angka Partisipasi Sakadial PAUD, SD/MI, SMP/MTs	Persentase Penyediaan Perbaikan Hubungan Industrial	Persentase ketahanan Pangan Utama	Persentase Desa/Kelurahan Tanggap Bencana	Persentase Rumah Layak Huni
	Target : 30.178 Orang	Target : 177.086 KPM	Target : 513 Orang	target : 90 %	Target : 97 %	Target : 97 %	Target : 98 %	Target : 100%	Target : 100 %	Target : 7,9 %	Target : 100%	Target : 12,5 %	90%	Target : 24,17 %
									2. Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan					
KEGIATAN (Output)	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lemah/Usia Terlantar, serta Gelandangan/Pengemis di Luar Perumahan Sosial; 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat/terpencil (KAT)	1. Penyediaan makanan	1. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil; 2. Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemenuhan dan Penyajian Database Kependudukan; 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kecetaraan	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha; 2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pedesaan Kabupaten/Kota	1. Sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab/Kota (Perjem Bencana); 2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kab/kota; 3. pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kab/kota	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; 2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
PAGU	475.000.000	2.348.466.650	300.013.000	200.000.000	600.000.000	400.000.000	150.000.000	9.000.000.000	13.487.289.000	46.950.439.600	8.110.915.850	2.810.915.000	518.877.000	959.999.750
PERANGKAT DAERAH	DINAS SOSIAL PSA P2KE	DINAS SOSIAL PSA P2KE	DINAS SOSIAL PSA P2KE		DISDUKCAPIL	DISDUKCAPIL	DISDUKCAPIL	SETDA	DINKES	DISDIBUD	DISPERKIMTAN LH	DISPERKIMTAN LH		DISPERKIMTAN LH

Final Outcome	KEMISKINAN				
	Angka Kemiskinan				
	Target 2023 : 23,02				

Strategi	2. Peningkatan Pendapatan masyarakat				
Intermediate Outcome	Meningkatnya Pemertahan atau Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS	Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat	MEMINGKATNYA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELALUI YANG DIKHELOLA DAN DIKEMBANGKAN	MEMINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN
	Indeks Kesehatan	Persentase PPKS yang Tertangani	Pengeluaran per Kapita	PERSENTASE OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELALUI	PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR UNGGULAN
	Target : 74,25	Target : 85%	Target : Rp. 8.030.000 /Org/ Tahun	Target : 10	Target : 5,1

Immediate Outcome	Melakukan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (K3)	Melakukan Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS	Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada KPM	Melakukan Pemberdayaan Sosial kepada PPKS dan IKAT	Melakukan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Hukum Adat di Desa/Kabupaten	Memfasilitasi Kerjasama Antar Desa	Melaksanakan Perencanaan dan Pembangunan Industri Pertanian	Menyelenggarakan Pelatihan Kerja dan Menata Produktivitas Tenaga Kerja	Memfasilitasi Pengembangan UMKM	Melakukan Pambinaan dan Mengembangkan Ekonomi Tradisional, Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang dibina dan dikembangkan	Menyediakan sarana dan prasarana pertanian	Melakukan pengalihan Perikanan Tangkap	Menangani Karawanan Pangan	Melaksanakan Penyuluhan Pertanian kepada Petani dan Kelompok Tani	Melaksanakan Peningkatan dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	1. Persentase Keluarga Sacoran yang menjadi anggota EKE, EKR dan EKL	Jumlah PMKS yang terdita dan Dinahabilitasi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah masyarakat PMKS dan IKAT yang ditangani	Persentase Pemberdayaan Lembaga Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kerjasama antar desa yang aktif	Persentase Keberhasilan sarana pertanian	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Persentase Jumlah UMKM yang Berkembang	Cakupan Ekosistem Tradisional, Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang dibina dan dikembangkan	Persentase keberhasilan sarana pertanian	Cakupan Peningkatan Kualitas Produk Perikanan Tangkap	Cakupan ketahanan energi dan protein perkapita	Cakupan Petani dan Kelompok Tani Mandiri	Cakupan Bencana Pertanian yang ditangani dan ditanggulangi
	Target : 77%	Target : 30.178 Orang	Target : 177.086 KPM	Target : 513 Orang	Target : 80 %	Target : 60 %	Target : 4 (angka)	Target : 63,4 %	Target : 55,5 %	Target : 13 %	Target : 53 %	Target : 87,6%	Target : 2749 Angka	Target : 36 Kelompok	Target : 30%

KEGIATAN (Output)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlestar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan/ Pengemis di Luar Panti Sosial ; 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat/Perencana (KAT)	1. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota ; 2. Pambinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 2.Fasilitas Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.Pengalihan dan Ekowisata Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 2.Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan specific lokasi 3.Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian 4.Pengadaan bibit/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain 5. Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain	Pengalihan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat Dihayutkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan pangan berbasis sumberdaya lokal	1.Pengembangan Kapasitas kelompok petani di kecamatan dan desa	Pengalihan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dihayutkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
PAGU	13.487.289.000	475.000.000	2.348.466.650	300.013.000	330.000.000	260.000.000	6.817.800.000	2.150.000.000	2.985.153.000	2.150.000.000	5.515.610.000	10.681.779.000	50.000.000	499.942.000	10.681.779.000
PERANGKAT DAERAH	DINKES	DINAS SOSIAL BSA P2KE	DINAS SOSIAL P3A P2KE	DINAS SOSIAL P3A P2KE	DINAS PMD	DINAS PMD	DISPERINDAG	DISPORAPAR	DINEKOP UKM NAKER	DISPORAPAR	DEPP	DINAS PERIKANAN	DEPP	DEPP	DINAS PERIKANAN

Final Outcome	KEMISKINAN											Final Outcome											
	Angka Kemiskinan																						
	Target 2023 : 23,02																						
Strategi	3. Penurunan jumlah kantong Kemiskinan											Strategi											
Intermediate Outcome	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Dasar									Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Antar Pulau	Intermediate Outcome											
	Indeks Pendidikan	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar									Tingkat Efektivitas Antar Pulau												
	Target : 62	Target : 57,99									Target : 40%												
Immediate Outcome	Menyediakan Akses Layanan Pendidikan Di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Menyediakan Akses dan Layanan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Layak Bagi Rumah Tangga Miskin	Melakukan Pengalokasian dan Menyediakan Sistem Pengalokasian Air Minum Bagi Rumah Tangga Miskin	Menjalani dan Mengembangkan Sistem Air Limbah di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Meningkatkan Penyediaan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) Di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Melakukan Rambuayasan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kantong Kemiskinan	Membantu Kawasan Permukiman Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Membantu Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Membangun dan Mengembangkan/Merhabakan Rumah Layak Huni bagi EPM di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Membangun, Mengembangkan dan Merhabatkan Jalan di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Membangun, Mengembangkan dan Merhabatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Menyalenggarakan Penyediaan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA) di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Immediate Outcome										
Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Akses Pendidikan di Desa Kantong Kemiskinan	Persentase Infrastruktur Pengalokasian Sumber Daya Air Yang di Bangun dalam Kondisi Baik di Desa Kantong Kemiskinan	Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Akses Terhadap Layanan Air Minum Layak	Persentase sarana dan prasarana sistem air limbah domestik yang tersedia dan terbagun dalam kondisi baik bagi Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Desa Kantong Kemiskinan	Cakupan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kantong Kemiskinan yang dibudayakan	Cakupan Permukiman Masyarakat Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan Layak Huni	Persentase Penurunan Lingkungan Permukiman Kumuh di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Cakupan Pembangunan dan Rehab Perumahan Layak Huni bagi EPM di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Persentase Rehab Jalan dalam Kondisi Mantap di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Lahu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Mantap di Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan	Target : 7,9 %	Target : 49,54 %	Target : 15,05 %	Target : 45,87 %	Target : 30%	Target : 92 %	Target : 35,01 %	Target : 70 %	Target : 24,17 %	Target : 77,6 %	Target : 40 %	Target : 73 %
KEGIATAN (Output)	1. Pengalokasian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ; 2. Pengalokasian Pendidikan Sekolah Dasar ; 3. Pengalokasian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ; 4. Pengalokasian Pendidikan Nonformal/Keletteran	1. Pengalokasian Pendidikan Sekolah Dasar ; 2. Pengalokasian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan pemukiman 2. Perbaikan SPAM tuhan jaringan perpipaan di kawasan pemukiman	1. Penyusunan rencana kebijakan strategi dan taknik cipta pengalokasian air limbah domestik dalam daerah kab/kota 2. Pembangunan/ Penyediaan sub-cipta pengalokasian setempat	Kegiatan Urutan Penyalenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi Kegiatan Rambuayasan Desa	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha ; 2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kegiatan Pemogohan Penumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pedes Desam Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota ; 2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyalenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1. Pembangunan, Perbaikan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Palabuhan Pengumpulan Lokal ; 2. Pembangunan, Perbaikan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Palabuhan Sungai dan Demau	1. Pembangunan, Perbaikan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Palabuhan Pengumpulan Lokal ; 2. Pembangunan, Perbaikan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Palabuhan Sungai dan Demau	KEGIATAN										
PAGU	46.960.439.600	50.283.000.000	500.000.000	696.104.500	500.000.000	1.268.252.000	8.110.915.850	2.810.916.000	959.999.750	27.580.000.000	3.631.190.000	3.631.190.000	PAGU										
PERANGKAT DAERAH	DISEKBUK	DISEKBUK	PUPR	PUPR	DISEKBUK N LK	KEC. PULAU MERBAU	DISPERKIMTAN LH	DISPERKIMTAN LH	DISPERKIMTAN LH	DINAS PU	DISHUB	DISHUB	PERANGKAT DAERAH										

3.2.4 Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik

Setelah memilih tema, menetapkan tema dan mengidentifikasi masalah dituangkan pada rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik. Penyusunan rencana aksi disertai dengan rumusan *output*, indikator, target waktu penyelesaian serta menetapkan unit kerja yang bertanggungjawab sebagai koordinator dan pelaksana dari pencapaian setiap rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara lengkap **rencana aksi reformasi birokrasi tematik dengan tema Pengentasan Kemiskinan dituangkan pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.**

3.2.5 Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik

Monitoring dan evaluasi RATL dilakukan berdasarkan dokumen rencana aksi reformasi birokrasi tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan). Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh evaluator internal. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi tematik maupun general dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi harus komprehensif dikoordinasikan, antara general dan tematik. Monitoring dan evaluasi akan berfokus padan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil).

BAB IV

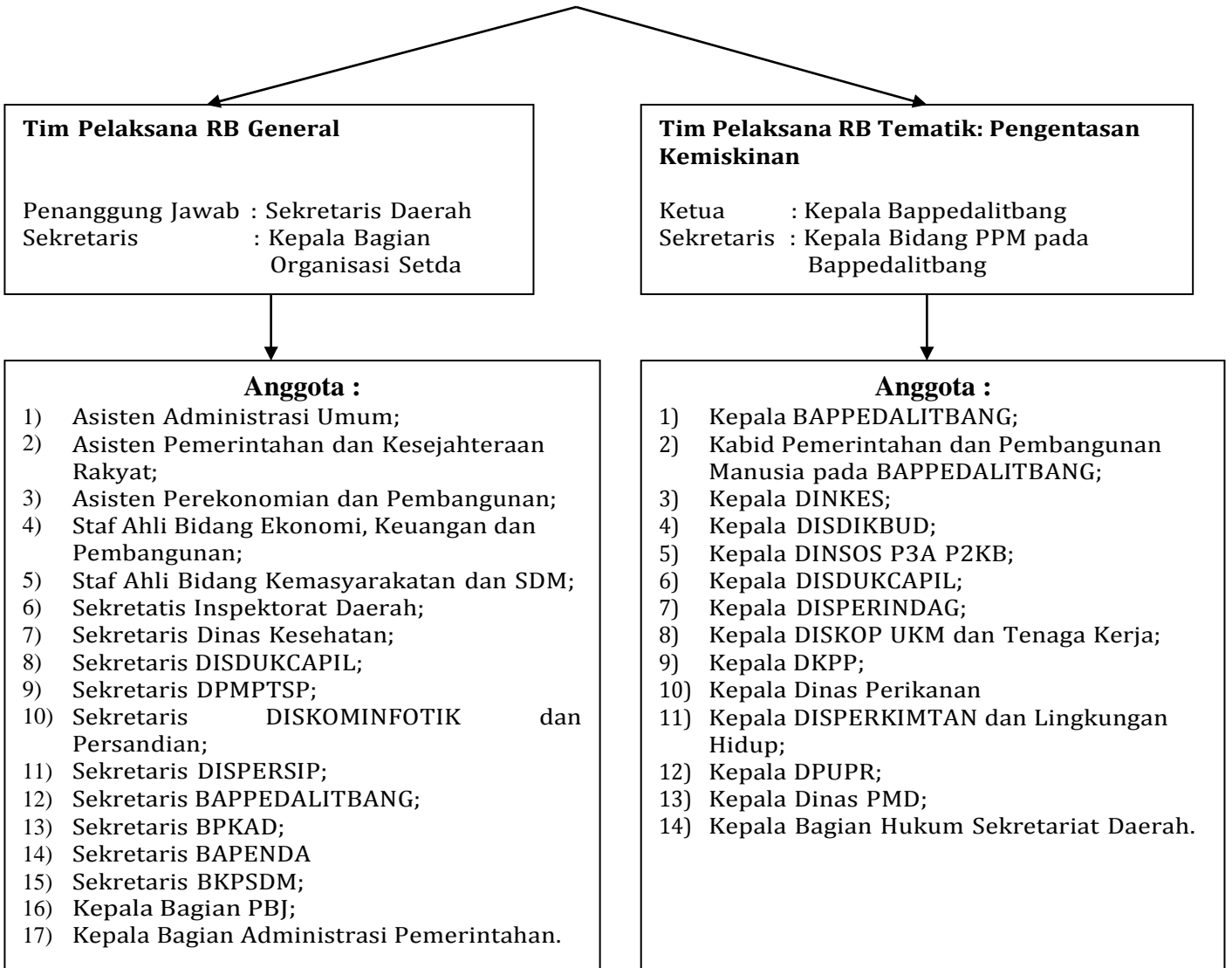
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASIPEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk TIM yang berperan melakukan pengelolaan reformasi birokrasi yang disebut Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Kepulauan terdiri dari Perangkat Daerah yang mengampu indikator-indikator yang menjadi kewenangannya. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki fokus dalam pelaksanaan Tematik yang telah ditetapkan. Struktur dan Uraian Tugas Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Tim Pengelola RB General dan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Tim Pengarah :
1. Bupati ; 2. Wakil Bupati;



Tabel 4.1 Uraian Tugas Tim Pengelola RB General dan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
A	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Meranti; 2. Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Meranti; dan 3. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran daerah maupun nasional yang berdampak serta dapat dirasakan oleh masyarakat.
B	Tim Pelaksana RB General	
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan kebijakan umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; 2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; 3. Memberikan arahan pelaksanaan kebijakan umum reformasi birokrasi; 4. Mengkoordinasikan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; 5. Memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> RB, dan berkelanjutan; 6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara berkala; 7. Menyampaikan hasil penilaian reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah; dan 8. Memberikan saran pertimbangan kebijakan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah.
2.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan saran dan pendapat serta membantu tugas Ketua dalam memberikan arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; 2. Menggantikan Ketua, apabila Ketua berhalangan, dalam pengambilan keputusan dan koordinasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; 3. Merumuskan pelaksanaan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; 4. Merancang rencana aksi reformasi birokrasi; 5. Melaksanakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan terhadap nilai-nilai indikator pada RB General agar target yang diharapkan bisa tercapai; 6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara

		berkala; 7. Menyiapkan penyelenggaraan rapat pengarah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; 8. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan 9. Menjadi Agen Perubahan reformasi birokrasi.
3.	Anggota	1. Melaksanakan <i>Road Map</i> RB dan program prioritas di Instansi dan Unit kerja; 2. Menjaga kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik; 3. Melakukan monev berkala terhadap pelaksanaan RB di Instansi dan Unit Kerjanya; 4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah melalui Ketua Tim Pelaksana RB; 5. Mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;

No .	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Membentuk Tim RB di internal Perangkat Daerah masing-masing, sesuai kebutuhan serta menyusun Rencana Aksi RB; 7. Menyusun strategi umum dan strategi komunikasi RB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; 8. Melakukan sosialisasi dan internalisasi sesuai indikator yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah; 9. Membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB General; 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi serta membangun regulasi, mekanisme organisasi RB sesuai indikator yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah; 11. Menyusun laporan tindak lanjut hasil penilaian terhadap indikator yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah; 12. Menjadi Agen Perubahan reformasi birokrasi.
C .	Tim Pelaksana RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan kebijakan umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; 2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; 3. Memberikan arahan pelaksanaan kebijakan umum Reformasi Birokrasi Tematik; 4. Memberikan arahan agar pelaksanaan tematik RB yang ditetapkan dapat berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> RB, dan berkelanjutan; 5. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tematik RB yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya secara berkala; 6. Menyampaikan hasil penilaian Reformasi Birokrasi Tematik kepada Tim Pengarah; dan 7. Memberikan saran pertimbangan kebijakan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik kepada Tim Pengarah. 8. Bertugas mengkoordinir dan memimpin TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti; 9. Melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Kabupaten/Kota melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan 10. Bertanggung jawab terhadap dokumen pelaksanaan TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti.

2.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan saran dan pendapat serta membantu tugas Ketua dalam memberikan arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; 2. Menggantikan Ketua, apabila Ketua berhalangan, dalam pengambilan keputusan dan koordinasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sesuai tema yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya; 3. Merumuskan pelaksanaan <i>Road Map</i> RB Tematik sesuai tema yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya; 4. Merancang rencana aksi reformasi birokrasi tematik sesuai tema yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya; 5. Melaksanakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan terhadap nilai-nilai indikator pada Tematik yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya agar target yang diharapkan bisa tercapai; 6. Membentuk Tim RB di internal Perangkat Daerah masing-masing, sesuai kebutuhan serta menyusun Rencana Aksi RB Tematik berdasarkan Temat yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya; 7. Menyusun strategi umum dan strategi komunikasi RB Tematik berdasarkan tema yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya; 8. Melakukan sosialisasi dan internalisasi sesuai indikator RB Tematik yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya; 9. Membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB Tematik yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya;
----	------------	--

No .	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
		<ol style="list-style-type: none"> 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi serta membangun regulasi, mekanisme organisasi RB Tematik sesuai indikator yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah; 11. Menyusun laporan tindak lanjut hasil penilaian terhadap indikator RB Tematik yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya; dan 12. Menjadi Agen Perubahan reformasi birokrasi. 13. Melakukan koordinasi penyusunan kegiatan dan program TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan sekretariat dan kelompok pengelola program; 14. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas kegiatan dan program TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dari sekretariat kelompok pengelola program; 15. Melakukan pemantauan dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kegiatan dan Program TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti di sekretariat dan kelompok pengelola program; 16. Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan program TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dari sekretariat dan kelompok pengelola program kepada ketua TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti; dan 17. Menyiapkan dukungan lainnya dalam pelaksanaan TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan <i>Road Map</i> RB tematik dan program kegiatan RB Tematik di Instansi dan Unit kerja; 2. Menjaga kesinambungan program kegiatan RB Tematik yang telah berjalan dengan baik; 3. Melakukan monev berkala terhadap pelaksanaan kegiatan RB Tematik di Instansi dan Unit Kerjanya; 4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah melalui Ketua Tim Pelaksana RB Tematik; 5. Mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan kegiatan RB Tematik ke dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah; 6. Membentuk Tim RB di internal Perangkat Daerah masing-masing, sesuai kebutuhan serta menyusun Rencana Aksi kegiatan RB Tematik di Instansi dan Unit kerjanya; 7. Menyusun strategi umum dan strategi komunikasi kegiatan RB Tematik di Instansi dan Unit kerjanya; 8. Melakukan sosialisasi dan internalisasi sesuai indikator RB Tematik yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya; 9. Membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB Tematik; 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi serta membangun regulasi, mekanisme organisasi RB Tematik sesuai indikator RB Tematik yang ditetapkan di

		<p>Instansi dan Unit kerjanya;</p> <ol style="list-style-type: none">11. Menyusun laporan tindak lanjut hasil penilaian terhadap indikator RB Tematik yang ditetapkan di Instansi dan Unit kerjanya;12. Menjadi Agen Perubahan reformasi birokrasi.
--	--	--

BAB V PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dokumen ini dapat bermakna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap perangkat daerah harus terus menerus bekerja keras untuk melaksanakan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bebas KKN, birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan pelayanan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus terus dibangun melalui penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Diharapkan dengan adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memberikan dampak yang positif, baik untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti itu sendiri maupun masyarakat umum secara keseluruhan. Demikian pedoman ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

A S M A R

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 8 TAHUN
2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN
2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020-
2024

Tabel Rencana Aksi Reformasi
 Birokrasi General Tahun 2023-
 2024

STRATEGI	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	BASIS (2022)	RENCANA AKSI	SATUAN	INDIKATOR RENCANA AKSI	LAKSANAAN								DENGAN RPJMD				TUNJANGAN / SAI KERJA			
									2023				TAHUN 2023	2024				TAHUN 2024	2023		2024		KOORDINATOR	PELAKSANA
									I	II	I	V		I	I	I	V		GM	PAGU (Rp)	GM	PAGU (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
SS. 1 : terciptanya tata kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel																								
Melakukan evaluasi organisasi secara optimal pada	Terimplementasikan Kebijakan Penyelenggaraan Birokrasi	Penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan struktur organisasi)	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	Persentase	100	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat	Kali	Jumlah pelaksanaan evaluasi kelembagaan per	-	-	-	-	0	-	1	-	-	1	Program : penguangan pemerintahan daerah	0	Program : penguangan pemerintahan daerah	720.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

tahun yang ditetapkan sesuai dengan Perm PA NRB Nomor 20 Tahun 2018	asi	sasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile				daerah		angka daerah										kabupaten / kota		kabupaten / kota				
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN melalui pendiklat dan pelatihan sesuai	Terminalkan pengetahuan dan keterampilan ASN melalui pendiklat dan pelatihan sesuai	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	Persentase	N / A	Penyusunan proses bisnis dan mekanisme kerja pelaksanaan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja	Dokumen	Jumlah dokumen proses bisnis dan mekanisme kerja	-	-	2	-	2	-	-	-	-	0	Program Kepegawaian Daerah	0	Program Kepegawaian Daerah	0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah

kompetensi	pegawai ASN dengan Baik					a pegawai																
						Penyusunan SK Tim Kerja pelaksanaan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	Dokumen	Jumlah dokumen SK Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	Program Kepegawaian Daerah	0	Program Kepegawaian Daerah	0

						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	Kali	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	Program Kepegawaian Daerah	10.000.000	Program Kepegawaian Daerah	0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
						Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi aparat	kali	Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	220.000.000	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah

						ur																		
Meningkatkan implementasi kebijakan arsitektur SPBE Nasional	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Nilai	2,12	Penyusunan arsitektur SPBE Kabupaten Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Surat Keputusan Bupati Tentang Arsitektur SPBE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.183.000.000	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.215.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN	Seluruh Perangkat Daerah
						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi arsitektur	Dokumen	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	-	-	-	-	0	-	1	-	-	1	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.183.000.000	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.215.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN	Seluruh Perangkat Daerah

						SPBE																		
Pengu atan tata kelola dan organi sasi penye lengga ra SPBE	Terim pleme nta sikan nya Kebija kan Arsite ktur SPBE Nasio nal					Penyu sunan arsite ktur SPBE	Doku men	Juml ah doku men arsite ktur SPBE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor mati ka	7.183 .000. 000	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor mati ka	7.215. 000.0 00	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN	Sel uru h Per ang kat Dae rah
						Peny usu nan peta renc ana SPB E	Doku men	Juml ah doku men peta renca na SPBE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor matik a	7.183 .000. 000	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor matik a	7.215. 000.0 00	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN	Sel uru h Per ang kat Dae rah
						Peny usun an inova si prose s bisni	Doku men	Jumla h doku men inovas i SPBE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor matik	7.183 .000. 000	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor matik	7.215. 000.0 00	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN	Sel uru h Per ang kat Dae rah

						s SPBE										a		a						
Opti mali sasi tata kelol a SPB E berke sinam bun gan	Terim pleme nta sikan nya Kebija kan Arsite ktur SPBE Nasio nal					Pema ntuan dan evalua si berkal a penyel enggar aa n SPBE	Lapor an	Jumla h doku men pema ntaua n dan evalua si penyel enggar aan SPBE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor mati ka	7.183 .000. 000	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor mati ka	7.215. 000.0 00	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN	Sel uru h Per ang kat Dae rah
Pengu atan integr asi dan terstr uktur nya penye lengga raa n SPBE	Terim pleme nta sikan nya Kebija kan Arsite ktur SPBE Nasio nal					Pene rapa n siste m peng hubu ng layan an SPB E	Aplik asi	Juml ah siste m peng hubu ng layan an SPBE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor mati ka	7.183 .000. 000	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor mati ka	7.215. 000.0 00	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN	Sel uru h Per ang kat Dae rah

Meningkatkan implementasi kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan arsitektur SPBE	Nilai	2,30	Penyusunan dokumen kebijakan internal SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan internal SPBE	-	-	1	2	2	1	2	3	4	4	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.183.000.000	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.215.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN	Seluruh Perangkat Daerah
Membangun infrastruktur dan konektivitas TIK yang	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional					Penyediaan pusat data yang handal dan berkualitas	Pusat Data	Jumlah data center	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.183.000.000	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.215.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN	Seluruh Perangkat Daerah

aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi	nal					Penyediaan jaringan intra Pemerintah Daerah	Jaringan Intra	Jumlah jaringan intra Pemerintah Daerah	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.183.000.000	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.215.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN	Seluruh Perangkat Daerah
						Pembangunan aplikasi pendukung SPBE	Sistem Informasi / Aplikasi / aplikasi	Jumlah sistem informasi / aplikasi	-	-	1	3	3	-	-	1	3	3	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.183.000.000	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.215.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN	Seluruh Perangkat Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manu	Terimplimentasinya Kebijakan Arsitektur					Penyenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TIK	Penyenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TIK	Jumlah penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan	-	-	1	2	2	-	-	1	2	2	Program : Pengelolaan Aplikasi Infor	7.183.000.000	Program : Pengelolaan Aplikasi Infor	7.215.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN	Seluruh Perangkat Daerah

sia pendu kung penye lengga raa n SPBE Ber kon sep Sm art City	SPBE Nasio nal					bagi penye lengga ra SPBE		han TIK										mati ka		mati ka				
Penin gkata n pema ntaua n dan evalu asi penye lengga raa n SPBE	Terim pleme nta sikan nya Kebija kan Arsite ktur SPBE Nasio nal					Penera pan Audit TIK secara berkal a	Do ku me n Aud it TIK	Juml ah Doku men Audit TIK	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas an	2.049 .732. 490	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas an	2.638 .739. 500	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN	Sel uru h Per ang kat Dae rah

Penin gkata n pema ntaua n dan evalu asi penye lengga raa n SPBE	Terim pleme nta sikan nya Kebija kan Arsite ktur SPBE Nasio nal					Melak ukan penila ian Mandi ri penyel engga ran SPBE secara berkal a	Doku men Doku men hasil penil aian mand iri penye lengga raa n SPBE	Jumla h Doku men hasil penila ian mand iri penyel enggar aan SPBE	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor mati ka	7.183. 000.0 00	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor mati ka	7.215. 000.0 00	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN	Sel uru h Per ang kat Dae rah
Pengu atan integr asi dan terstr uktur nya penye lengga raa n SPBE	Terim pleme nta sikan nya Kebija kan Arsite ktur SPBE Nasio nal					Pen guat an pen erap an kola bora si pen erap an SPB E anta r Inst	Dok ume n	Jumla h doku men pener apan integr asi dan kolab orasi penyel enggar aan SPBE	-	-	-	-	0	-	-	-	1	1	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor mati ka	7.183. 000.0 00	Prog ram : Peng elola an Apli kasi Infor mati ka	7.215. 000.0 00	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN	Sel uru h Per ang kat Dae rah

						ansi																		
Mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi	Terimplementasi Sistem Perencanaan, Penganngaran dan Informasi Kinerja yang Terint	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	Nilai	68,96	Penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja	Dokumen	Jumlah dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.085.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.290.000.000	BAPPE DALITB ANG	Seluruh Perangkat Daerah

					Merevi u kemba li doku men penjen jangan kinerj a (<i>casca de down</i>) dan melak ukan penjab aran <i>crossc utting</i> denga n menga cu pada Perme n PANR B Nomor 89	Per ang kat Da era h	Jumla h Peran gkat Daera h yang dilaku kan reviu indika tor kinerj a	-	-	3 5	-	35	-	-	3 5	-	35	Progr am Koord inasi dan Sinkr onisa si Peren canaa n Pemb angu nan Daera h	2.835. 000.00 0	Progr am Koord inasi dan Sinkr onisa si Peren canaa n Pemb angu nan Daera h	2.320. 000.00 0	BAPPE DALITB ANG	Sel uru h Per ang kat Dae rah
--	--	--	--	--	---	-------------------------------------	---	---	---	--------	---	-----------	---	---	--------	---	-----------	--	-----------------------	--	-----------------------	------------------------	--

						ai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan																		
						Penyusunan Peraturan Bupati atau SOP tentang Pedoman teknis peren	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati Pedoman teknis perencanaan	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1. Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ; 2. Prog	3.659.477.380	1. Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ; 2. Prog	4.648.252.706	1. BAPPE DALITB ANG ; 2. INSPEKTORAT DAERAH ; 3. Bagian Organisasi Sekreta	Seluruh Perangkat Daerah

						<p>canaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti</p>	<p>kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja</p>										<p>ram : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ; 3. penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota</p>	<p>ram : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ; 3. penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota</p>	<p>riat Daerah</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

					Penyusunan pedoman teknis yang memuat standar sistem atika penyusunan LKj IP, penajaman analisis faktor penghambat, analisis faktor pendukung dan rekomendasi	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati Tentang pedoman teknis yang memuat standar sistem atika penyusunan LKj IP	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Program : penerangan pemerintahan daerah kabupaten/kota	92.108.000	Program : -		-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	---	---------	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--	------------	-------------	--	---	--------------------------------------	--------------------------

						serta tabel dan analisis tingkat efisiensi dan efektivitas																		
						Penyusunan pedoman evaluasi AKIP yang disesuaikan dengan Permen PANRB Nomor 88 Tahu	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati Tentang pedoman evaluasi AKIP	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	Program : -	-	Program : -	-	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

						n 2021																				
						Penyusunan Peraturan Bupati tentang <i>Reward and Punishment</i> dan memberikan rekomendasi untuk hasil evaluasi internal dan rekomendasi tersebut ditind	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Reward and Punishment	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	Program : -		-	Program : -		-	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah

Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbagai bukti (<i>evidence base dan planning</i>)	Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendukung	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	84,4	Penyediaan data perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persepsi	Persepsi ketersediaan data dan Informasi pembangunan daerah serta penggunaan Satu Data Indonesia dalam proses perencanaan pembangunan daerah	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.085.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.290.000.000	BAPPE DALITB ANG	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--------------------------------	-------	------	--	----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---------------	---	---------------	------------------	--------------------------

	Penin gkata n Akunt abilita s Kinerj a Insta hsi																							
Mem astik an terlak sana nya renca na pemb angu nan Daera h secar a efekti f dan efisie n melal ui penge ndali	Terim pleme nta sikan nya Siste m Peren canaa n, Penga nggar an dan Infor masi Kinerj a yang Terint egrasi , Berba					Pelak sanaa n koord inasi dan kolab orasi denga n <i>stake holder</i> dalam rangk a perce patan pelak sanaa n pemb angu nan	Perse ntase	Perse ntase kesela rasan nome nklat ur antar doku men peren canaa n dan penga nggar an Pemer intah Daera h	-	-	1 0 0	-	10 0	-	-	1 0 0	-	1 0 0	Progr am Koord inasi dan Sinkr onisa si Peren canaa n Pemb angu nan Daera h	2.835. 000.00 0	Progr am Koord inasi dan Sinkr onisa si Peren canaa n Pemb angu nan Daera h	2.320. 000.00 0	BAPPE DALITB ANG	Sel uru h Per ang kat Dae rah

an prose s pemb angu nan	sis Tekno logi Infor masi yang Mend orong Penin gkata n Akunt abilita s Kinerj a Insta					strate gis berba sis digital																		
Mend orong Bappe dalitb ang dalam Perce patan Pelak sanaa n Pemb angun an Daera	Terim pleme nta sikan nya Siste m Peren canaa n, Penga nggar an dan Infor					Pelak sanaa n koord inasi dan kolab orasi denga n <i>stake holder</i> dalam rangk a	Perse ntase	Perse ntase kesela rasan pagu angga ran antar doku men peren canaa n dan pagu angga	-	-	8 1	-	81	-	-	8 2	-	82	Progr am Koord inasi dan Sinkr onisa si Peren canaa n Pemb angu nan Daera	2.835. 000.00 0	Progr am Koord inasi dan Sinkr onisa si Peren canaa n Pemb angu nan Daera	2.320. 000.00 0	BAPPE DALITB ANG	Sel uru h Per ang kat Dae rah

h.	masi Kinerj a yang Terint egrasi , Berba sis Tekno logi Infor masi yang Mend orong Penin gkata n Akun tabilit as Kinerj a Insta nsi Peme rinta h					perce patan pelak sanaa n pemb angu nan strate gis berba sis digital	ran pemer intah daera h							h		h							
					Pelak sanaa n koord inasi dan kolab orasi denga n <i>stake holder</i> dalam rangk a perce patan pelak	Perse ntase	Pers enta s pene tapa n doku men pere ncan aan tepat wakt u	-	-	1 0 0	-	10 0	-	-	1 0 0	-	1 0 0	Progr am Peren cana an, Peng endal ian dan Eval uasi Pemb angu nan Daer ah	3.085. 000.0 00	Progr am Peren cana an, Peng endal ian dan Eval uasi Pemb angu nan Daer ah	3.290. 000.0 00	BAPPE DALITB ANG	Sel uru h Per ang kat Dae rah

Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Kabupaten bidang Perencanaan, Penganggaran serta Penguasaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah						Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif	Dokumen	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan laporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Dokumen Laporan IPKD)	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	Program : Penguasaan dan Evaluasi Program Pembangunan (Mon ev)	3.085.000.000	Program : Penguasaan dan Evaluasi Program Pembangunan (Mon ev)		- BAPPE DALITB ANG	Seluruh Perangkat Daerah
---	--	--	--	--	--	---	---------	--	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--	---------------	--	--	--------------------	--------------------------

ah																							
Meningkatkan kinerja Bappedalitbang sebagai OPD perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel						Meningkatkan kualitas SDM Fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Kali	Jumlah Pelatihan Fungsional Perencana	-	-	10	-	10	-	10	-	10	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.407.000.000	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.986.000.000	BAPPE DALITB ANG	Seluruh Perangkat Daerah

bel.						Men amb ah juml ah SDM Fun gsio nal Pere ncan a di lingk unga n Pem erint ah Kab upat en Kep ulau an Mera nti	Oran g	Ju mla h Apa rat ur Fun gsio nal Pere nca na	-	-	1 0	-	10	-	-	1 0	-	10	Progr am Penu njang Urus an Peme rinta han Daer ah Kabup aten /Ko ta	8.407. 000.00 0	Progr am Penu njang Urus an Peme rinta han Daer ah Kabup aten /Ko ta	8.986. 000.00 0	BAPPE DALITB ANG	Sel uru h Per ang kat Dae rah
------	--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--------	---	-----------	---	---	--------	---	-----------	--	-----------------------	--	-----------------------	------------------------	--

Mendorong peningkatan kualitas basis data kepegawaian dan pemetaan kompetensi jabatan di Inspektoraat daerah	Meningkatkannya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Perangkat Daerah	N / A	Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada 4 (empat) Perangkat Daerah Pelayanan Publik yaitu DISD UKCA PIL, DPMP TSP,	Unit Kerja	Unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK / WBB M	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	Program : Perumusan Kebijakan, Pendaan dan Asistensi	482.369.380	Program : Perumusan Kebijakan, Pendaan dan Asistensi	518.252.706	Inspektoraat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
--	-------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------	-------	---	------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------------	--	-------------	---------------------	--------------------------

						BAPE NDA dan UPT RSUD Kab. Kepul auan Meran ti																		
						Menyu sun dan melak ukan pemuk akhira n (<i>updati ng</i>) peta kompe tensi	Doku men	Jumla h Doku men pemuk akhira n peta kompe tensi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas an	2.049. 732.49 0	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas an	2.638. 739.50 0	Inspekt orat Daerah	Sel uru h Per ang kat Dae rah

Mengintensifkan koordinasi internal terhadap penyusunan, penetapan dan pemantauan kebijakan tentang manajemen resiko di lingkungan Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan					Pelaksanaan evaluasi terhadap peta risiko perangkat daerah	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan evaluasi peta risiko	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	2.049.732.490	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	2.638.739.500	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
						Pelaksanaan (<i>Focus Group Discussion / FGD</i>) dengan pakar / praktisi/ akademisi sesuai bidang Perangkat	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan FGD	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1. Program : Penyelenggaraan Pengawasan ; 2. Program : Penujangan urusan pemerintahan daerah	2.141.840.490	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	3.478.739.500	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Kabu
paten
Kepul
auan
Mera
nti

Daera
h
masin
g-
masin
g yang
untuk
mengi
dentifi
kasi
registe
r
risiko
dan
renca
na
tindak
penge
ndalia
n
menca
kup
Risiko
Strate
gis
Pemer
intah
Daera
h
(RSP),
risiko

h
kabu
paten
/kot a

					strate gis Peran gkat Daera h (RSO), risiko operas ional Peran gkat Daera h (ROO) dan risiko fraud																		
					Melaks anaka n evalua si registe r- registe r risiko dan rencan a	Doku men	Juml ah doku men hasil evalu asi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1. Prog ram : Penye lengg ara an Peng awas an ; 2. Prog ram : Penu njang	2.141. 840.49 0	1. Prog ram : Penye lengg ara an Peng awas an ; 2. Prog ram : Penu njang	3.478. 739.50 0	Inspekt orat Daerah	Sel uruh Per ang kat Dae rah

					tindak penge ndalia n masin g- masin g Perang kat Daera h denga n memb ahasn ya terlebi h dahul u bersa ma (<i>Focus Group Discu ssion /FGD</i>) denga n Kepala											urus an peme rinta han daera h kabu paten /kot a		urus an peme rinta han daera h kabu paten /kot a			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--

Mendorong percepatan pembaharuan SOP Penyusunan kinerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan terkini	Meningkat nya Kualitas Pengawasan				Melakukan evaluasi dan mempertaharui SOP Penyusunan kinerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan terbaru	Dokumen	Jumlah Dokumen SOP yang telah diperbaharui	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	Program : -	-	Program : -	-	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	---	---------	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	----------------	---	----------------	---	-----------------------	--------------------------------

Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan kebijakan yang memberikan APIP kewenangan untuk mengajukan anggaran/r evisi anggaran dalam melak	Meningkat nya Kualitas Pengawasan					Menyusun SOP tentang penyusunan program dan anggaran yang melibatkan APIP	Dokumen	Jumlah dokumen SOP penyusunan anggaran	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	Program : -		-	Program : -		-	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	----------------	--	---	----------------	--	---	-----------------------	--------------------------------

sanakan aktivitas pengawasan intern																										
Meningkatkan koordinasi interal Inspektorat Daerah dalam penentuan dan penetapan obyek audit ketaan di Lingk	Meningkatkan Kualitas Pengawasan					Menyusun dan melakukan evaluasi pedoman pelaksanaan audit ketaan	Dokumen	Jumlah dokumen SOP pelaksanaan audit ketaan	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Program : -		-	Program : -		-	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

ungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti																									
Meningkatkan koordinasi internal Inspektora Daerah dalam penentuan dan penetapan obyek audit kinerja di Lingk					Menyusun PKPT Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2023	Dokumen	Jumlah dokumen PKPT	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	Program : -		-	Program : -		-	Inspektora Daerah	Seluruh Peringkat Daerah

Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan kebijakan tentang Pengendalian kecurangan di lingk	Meningkat nya Kualitas Pengawas an				Melakukan <i>workshop</i> dan sosialisasi tahap an audit yang menggunakan pendekatan berbasis risiko	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan <i>workshop</i>	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Program : -	-	Program : -	-	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	---	----------	--	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	----------------	---	----------------	---	-----------------------	--------------------------------

ung n Peme rinta h Kabu paten Kepul auan Mera nti					Melak sanak an Audit Kinerj a yang Tingka t Pemda menek ankan pada Pening katan ketaat an kepad a peratu ran, perbai kan kinerj a (Ekon omis, Efisie nsi, dan Efekti vitas),	Doku men	Juml ah doku men hasil audit kinerj a	-	-	4	-	4	-	-	4	-	4	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas an	2.049. 732.49 0	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas an	2.638. 739.50 0	Inspekt orat Daerah	Sel uru h Per ang kat Dae rah
---	--	--	--	--	--	-------------	--	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--	-----------------------	--	-----------------------	---------------------------	--

mekanisme/pr osedur monitoring tindakan lanjut atas rekomendasi hasil audit kinerja; 2. Mengefektifkan aktivitas supervisi berjenjang ; serta 3. Menin					Melakukan supervisi dan/atau review berjenjang dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal pada setiap tahap an audit kinerja yang meliputi tahap persiapan/p eren	Dokumen	Jumlah	-	-	4	-	4	-	-	4	-	4	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	2.049.732.490	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	2.638.739.500	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	--	---------	--------	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--	---------------	--	---------------	-----------------------	--------------------------------

Meningkatkan konsistensi, efektifitas dan efisiensi evaluasi berkala kegiatan pengawasan intern (audit kinerja, audit ketaatans asurans atas GRC/	Meningkatkan Kualitas Pengawasan				Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan/pedoman dan implementasi kegiatan pengawasan intern (audit kinerja, audit ketaatans asurans atas	Dokumen	Jumlah dokumen hasil evaluasi terhadap pengawasan audit	-	-	-	2	2	-	-	2	-	2	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	2.049.732.490	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	2.638.739.500	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
---	----------------------------------	--	--	--	---	---------	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------	--------------------	--------------------------

Governan ce Risk dan Contr ol, dan layan an kons ultasi) oleh Inspe ktorat Daera h Kabu paten Kepul auan Mera nti					GRC/ Gover nanc e Risk dan Contr ol, dan layana n konsu ltasi)																		
Meni ngkat kan konsi stens i, efekti fitas	Meni ngkat nya Kuali tas Peng awas an				Telah dilaks anaka n penja minan kualit as	Dok ume n	Jum lah doku men Penil aian Man diri	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas	2.049. 732.49 0	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas	2.638. 739.50 0	Inspekt orat Daerah	Sel uru h Per ang kat Dae rah

dan efisiensi evaluasi berkala penilaian mandiri secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP level 3						atas penilaian mandiri SPIP terintegrasi tahun 2022 dan melakukan penjaminan kualitas untuk penilaian SPIP terintegrasi tahun 2023 dan tahun 2024	SPIP										an		an			
---	--	--	--	--	--	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	----	--	--	--

Meningkatkan peran Inspektora Daerah yang menjamin terjadinya peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan anggaran	Meningkatkan Kualitas Pengawasan	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	Merevisi kembali dokumen penjaminan kinerja (<i>cascade down</i>) dan melakukan penjabaran <i>crosscutting</i> dengan mengacu pada Permen PANRB Nomor 89	Dokumen	Jumlah dokumen hasil reviu penjaminan kinerja	-	-	35	-	35	-	-	35	-	35	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.835.000.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.320.000.000	Inspektora Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
---	----------------------------------	---	------------------------	-------	---	--	---------	---	---	---	----	---	-----------	---	---	----	---	-----------	--	---------------	--	---------------	-------------------	--------------------------

						ai dasar untuk menye mpur nak an peren canaa n kinerj a secar a kesel uruha n																		
						Mel aku kan eval uasi case cadi ng Pera ngk at Dae rah	Dok ume n	Juml ah doku men hasil evalu asi	-	-	3 5	-	35	-	-	3 5	-	35	Progr am : Peru musa n Kebij akan, Penda mpin gan dan Asist ensi	482.36 9.380	Progr am : Peru musa n Kebij akan, Penda mpin gan dan Asist ensi	518.25 2.706	Inspekt orat Daerah	Sel uru h Per ang kat Dae rah

						Menyusun pedoman teknis (Peraturan Bupati atau SOP) tentang Pedoman teknis perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Pedoman teknis perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.085.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.290.000.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	--	---	---------	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	---	---------------	---	---------------	--------------------	--------------------------

						Melakukan reviu terhadap kualitas indikator sasaran strategis, program dan kegiatan serta target peran gkat daerah	Dokumen	Jumlah dokumen hasil reviu	-	-	35	-	35	-	-	35	-	35	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.835.000.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.320.000.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
Mendorong	Meningkatkan					Melakukan sosialisasi secara intensif tugas	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosi	-	1	-	2	2	-	-	-	1	1	Program : penunjang urusan pementa	92.108.000	Program : penunjang urusan pementa	840.000.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

penetapan kebijakan tentang pedoman dan strategi pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti					dan tanggung jawab pengelolaan risiko kepada unit pemilik risiko dan komitmen pengelolaan risiko	analisa									han daerah kabupaten/kota	han daerah kabupaten/kota							
					Menyusun risiko strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,	Dokumen	Jumlah dokumen risiko strategis	-	-	1	-	1	-	-	1	-	0	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemb	3.177.108.000	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemb	4.130.000.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

					risiko fraud dan risiko kemitraan.											anggaran Daerah ; 2. Program : penguji- urusan pemerintah daerah kabupaten /kota		anggaran Daerah ; 2. Program : penguji- urusan pemerintah daerah kabupaten /kota					
Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan kebijakan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan				Menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan kecur	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Peningkatan	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	Program : -	-	Program : -	-	Inspektoral Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Mend orong Inspe ktorat Daera h Kabu paten Kepul auan Mera nti untuk melak ukan audit kepat uhan dan audit kinerj a pada kegiat an- kegiat an yang memil iki risiko	Meni ngkat nya Kuali tas Peng awas an				Melak ukan audit kepat uhan dan audit kinerj a pada kegiat an- kegiat an yang memili ki risiko tinggi sesuai denga n PKPT berbas is risiko	Per ang kat Da era h	Juml ah Peran gkat Daera h yang dilak ukan audit	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas an	2.049. 732.49 0	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas an	2.638 .739. 500	Inspekt orat Daerah	Sel uru h Per ang kat Dae rah
---	--	--	--	--	--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--	-----------------------	--	-----------------------	---------------------------	--

tinggi secara konsisten, berkala, efektif dan efisien																								
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut penguatan masyarakat LAPO R yang sudah diselesaikan	Persentase	50	Melaksanakan asistensi terhadap SDM pada perangkat daerah lokasi khusus (Lokus) evaluasi	Kegiatan	Jumlah kegiatan asistensi pelayanan publik	-	5	-	-	5	-	5	-	-	5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	92.108.000	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	840.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

						pelay anan publi k																		
						Melak sanak an monit oring dan evalua si stand ar pelaya nan publik	Doku men	Juml ah doku men hasil monit oring dan evalu asi	1	2	3	4	4	1	2	3	4	4	Prog ram : Pen unja ng Uru san Pem erint ah Kab /Kot a	92.108 .000	Prog ram : Pen unja ng Uru san Pem erint ah Kab /Kot a	840. 000. 000	Bagian Organi sasi Sekreta riat Daerah	Sel uru h Per ang kat Dae rah
						Pelak sana an peng elola an peng adua n melal ui SP4N	Perse ntase	Persen tase penga duan yang ditind aklanj uti	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	Prog ram : Apli kasi Infor mati ka	7.183 .000. 000	Prog ram : Apli kasi Infor mati ka	7.215 .000. 000	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN	Sel uru h Per ang kat Dae rah

Meningkatkan kualitas perekutan serta promosi aparatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti	Meningkatkan Kualitas Pengawasan	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	Level	4,12	Menyusun Peraturan Bupati tentang Pola Karir PNS dan Menyusun SOP tentang Pola Karir PNS	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati dan SOP	-	2	-	-	2	-	-	-	-	0	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.077.681	Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
Meningkatkan kualitas implementasi atura	Meningkatkan Kualitas Pengawasan					Melakukan sosialisasi dan asistensi terkait gratifikasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang men	-	-	35	-	35	-	-	35	-	35	Program : Perumusan Kebijakan, Penda	482.369.380	Program : Perumusan Kebijakan, Penda	518.252.706	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

n tenta ng penge ndalia n serta pence gahan gratifi kasi di lingku ngan Pemer intah Kabu paten Kepul auan Meran ti					kasi kepad a seluru h peran gkat daera h		gikut i kegi atan sosia lisasi									gan dan Asist ensi		gan dan Asist ensi					
Meni ngkat kan konsi stensi , efektif itas dan	Meni ngkat nya Kuali tas Peng awas an				Melak ukan audit ketaa tan pada Peran gkat Daera	Per ang kat Da era h	Juml ah Peran gkat Daera h yang dilak ukan	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas an	2.049. 732.49 0	Progr am : Penye lengg ara an Peng awas an	2.638. 739.50 0	Inspekt orat Daerah	Sel uruh Per ang kat Dae rah

efisien audit internal secara berkala di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan MeraNTi					h		audit																
Meningkatkan cakupan pelayanan serta tindakan lanjutan	Meningkatkan Kualitas Pengawasan				Melakukan pengembangan dan implementasi SPBE dan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi imple	1	2	3	4	4	1	2	3	4	4	1. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika ;	7.275 .108. 000	1. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika ;	8.055 .000. 000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Melakukan koordinasi terhadap harmonisasi pembentukan regulasi dengan optimal sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentu	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks	N / A	Menyusun kelengkapan administrasi Pembentukan produk hukum daerah dari tahap usulan, harmonisasi sampai dengan terbitnya produk hukum daerah	Dokumen	Jumlah dokumen produk hukum daerah	-	-	-	748	748	-	-	-	750	750	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100.000.000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	120.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
---	--	--	----------------------------------	--------	-------	--	---------	------------------------------------	---	---	---	-----	------------	---	---	---	-----	------------	---	-------------	---	-------------	---------------------------------	--------------------------

kan Peraturan Perundang-undangan						h tersebut																		
Melakukan pengembangan kompetensi ASN legal Drafter sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 65 Tahun 2021	Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	N / A	Melakukan uji kompetensi bagi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan	Orang	Jumlah ASN JF Perancang peraturan perundang-undangan	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1	Program Pengembangan SDM Aparatur	14.705.000	Program Pengembangan SDM Aparatur	43.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

tentang JF Perancangan Peraturan Perundang-undangan																								
Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan kebijakan tentang tata naskah	Meningkatkan kualitas pelayanan dan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Persentase Peringkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara digital	Persentase	33	Penyusunan revisi Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	1. Program : Pembinaan Perpustakaan ; 2. Program : penunjang urusan pemerintahan	598.75 1.280	1. Program : Pembinaan Perpustakaan ; 2. Program : penunjang urusan pemerintahan	1.346. 643.280	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Peringkat Daerah

h dinas dan penge lolaan kearsi pan di lingk unga n Peme rinta h Kabu paten Kepul auan Mera nti																daera h kabu paten /kot a		daera h kabu paten /kot a			
																8	Prog ram : Peng elola an Arsi p	165.52 1.040	Prog ram : Peng elola an Arsi p	165.78 3.124	Dinas Perpust akaan dan Kearsip an

Mend oron g inter nalis asi serta imple ment asi kebij akan tenta ng tata nask ah dinas dan peng elola an kears ipan di lingk unga n Peme rinta h	Meni ngkat nya kualit as penge lolaan arsip digita l dan data statis tik sekto ral					Melak ukan pemb inaan dan penga wasan pengel olaan Arsip pada setiap Perang kat Daera h	Kali	Juml ah pelak saan kegiat an pemb inaan dan penga wasa n	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	Prog ram : Peng elola an Arsi p	165.52 1.040	Prog ram : Peng elola an Arsi p	165.78 3.124	Dinas Perpust akaan dan Kearsip an	Sel uru h Per ang kat Dae rah
---	--	--	--	--	--	--	------	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--	-----------------	--	-----------------	---	--

n Dina mis Teri nteg rasi (SRI KAN DI) sert a alih me dia						ulau an Mer anti																		
Mend orong perce patan pener apan Kearsi pan Daera h menja di simpu l Jarini gan Infor	Meni ngkat nya kualit as penge lolaan arsip digita l dan data statis tik seкто ral					Mela kuka n koor dinas i deng an DISK OMI NFO Kab. Kep. Meran ti dan selanj utnya	Kegia tan	Ju mla h pela ksa an kegi ata n koo rdin asi	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Prog ram : Peng elola an Arsi p	165.52 1.040	Prog ram : Peng elola an Arsi p	165.78 3.124	Dinas Perpust akaan dan Kearsip an	Sel uru h Per ang kat Dae rah

masi Kearsi pan Nasio nal.					melak ukan komu nikasi ke ANRI untuk memp ercepa t Dinas Perpu staka an dan Kearsi pan Kabu paten Kepul auan Meran ti menja di simpu l pada Jaring an Infor masi													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Maksimal Sumber Daya Aparatur (arsip aris, Teknologi Informatika) yang ada sehingga memadai dalam pelaksanaan layanan Jaringan Informasi Kearsip	Orang	Jumlah Aparatur Arsip aris dan Teknologi Informatika	-	-	-	2	2	-	-	-	-	0	Program : Pengelolaan Arsip	165.521.040	Program : Pengelolaan Arsip	165.783.124	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	--	-------	--	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	-----------------------------	-------------	-----------------------------	-------------	----------------------------------	--------------------------

						pan Nasio nal																
	Meni ngkat nya kualit as penge lolaan arsip digita l dan data statis tik sekto ral	Pelak sana an Data Stati stik Sekt oral	Tingka t kemat angan penyel enggar aan statisti k sektor al	Per ang kat Da era h	N / A	Penyu sunan Doku men Peratu ran Bupati Kepul auan Meran ti Nomor 092 Tahun 2022 tentan g Penyel enggar aan Satu Data Indon esia di	Do ku me n Per atu ran Bu pati	Jumla h Doku men Peratu ran Bupati Kepul auan Meran ti Nomor 092 Tahun 2022 tentan g Penyel enggar aan Satu Data Indone sia di	Sudah terealis asi		-	-	-	-	0	Progr am : Progr am Penye lengga an Statis tik Sekto ral	402.00 0.000	Progr am : Progr am Penye lengga an Statis tik Sekto ral	403.00 0.000	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN	1. Dinas Perind ustria n dan Perdag angan; 2. Dinas Pembe rdayaa n Masya rakat dan Desa; 3. Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an; 4.	

						Kabupaten Kepulauan Meranti		Kabupaten Kepulauan Meranti												Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 6. Dinas Perikanan; 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil			
						Penyusunan Standar Operasional Procedure (SOP) SDI dan EPSS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023-2024	Dokumen SOP	Jumlah Dokumen <i>Standar Operasional Procedure</i> (SOP) SDI dan EPSS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023-2024	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	403.000.000	DISKOMINFO DAN PERSANDIAN

					untuk Formasi Fungsional Statis tisi dan Fungsional Prana ta Komp uter di Lingk ungan Pemer intah Kabu paten Kepul auan Meran ti Tahu n 2023-2024	untuk Formasi Fungsional Statis tisi dan Fungsional Prana ta Komp uter di Lingk ungan Pemer intah Kabu paten Kepul auan Meran ti Tahu n 2023-2024								/kot a		/kot a			dan Desa; ³ . Dinas Ketaha nan Pangan dan Pertani an; ⁴ . Dinas Komun ikasi, Inform atika, Statisti k dan Persan dian; 5. Badan Perenc anaan Pema nguna n Daerah , Peneliti an dan Penge mban g an; 6. Dinas
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

						Penyusunan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023	Dokumen Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	403.000.000	DISKOMINFO DAN PERSANDIAN	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--	-------------	--	-------------	---------------------------	---

					an Penila ian Terha dap Evalu asi Penyel engga raa n Statist ik Sektor al di Wilay ah Kabup aten Kepul auan Meran ti Tahun 2023																Dinas Pendid ikan; 9. Dinas Keseh atan; 10. Dinas Sosial P3A P2 KB	
					Mela ksan akan kegia tan Sosia lisasi	Kegi atan	Jumla h Kegiat an Sosial isasi SDI	-	1	-	-	1	-	1	-	-	0	Progr am : Progr am Penye lengg ara	402.00 0.000	Progr am : Progr am Penye lengg ara	403.00 0.000	DISKO MINFO TIK DAN PERSA NDIAN

						SDI dan EPSS		dan EPSS								an Statistik Sektoral		an Statistik Sektoral						
						Melaksanakan kegiatan penandatangan Perjanjian Kerjasama antara BPS dan 10 Kepala Perangkat Daerah	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani OPD bersama dengan BPS	-	10	-	-	-	-	0	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	403.000.000	DISKOMINFO DAN PERSANDIAN	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 4. Dinas			
						Melaksanakan kegiatan	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan	-	3	7	10	10	-	3	7	10	10	Program : Program Penyelenggaraan	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan	403.000.000	DISKOMINFO DAN PERSANDIAN	Komunikasi, Informatika, Statistika

					Melaksanakan review pelaksanaan EPSS dan penjaminan kualitas data secara berkala kepada OPD (10 OPD)	Kegiatan	Jumlah kegiatan review	-	1	-	2	2	-	1	-	2	2	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	403.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 4. Dinas Komunikasi, Infor
					Mengumpulkan bukti dukung penyelenggaraan	Dokumen	Jumlah dokumen bukti dukung (SK, Surat	-	1	-	2	2	-	1	-	2	2	Program : Program Penyelenggaraan Statis	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Statis	403.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN	n dan Pertanian; 4. Dinas Komunikasi, Infor

					SDI dan statistik sektoral di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 s/d Tahun 2024 untuk disimpan dalam satu sistem database yang terintegrasi	Undangan, Foto, Notulen, Daftar Hadir, dsb)							tik Sektoral		tik Sektoral			matika, Statistik dan Persandian; 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 6. Dinas Perikanan; 7. Dinas
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--

					Membuat sistem database yang terintegrasi untuk pengumpulan bukti dukungan EPSS, Pengajuan Romantik, dan Standarisasi Data melalui Aplikasi INDAH	Sistem database	Jumlah sistem database (Toolbar)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	403.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja; 8. Dinas Pendidikan; 9. Dinas Kesehatan; 10. Dinas Sosial P3A P2 KB
--	--	--	--	--	---	-----------------	----------------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--	-------------	--	-------------	---------------------------------	--

					Menyusun Dokumen Metadata dari Perangkat Daerah yang telah mengikuti pembinaan	Dokumen Metadata sesuai Standar SDI	Jumlah dokumen Metadata Statistik yang sesuai Standar SDI	-	3	7	10	10	-	3	7	10	10	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	403.000.000	DISKOMINFO DAN PERSANDIAN	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	
					Meningkatkan penggunaan FS3 untuk membuat rancangan	Dokumen	Jumlah dokumen rekomendasi statistik yang ditindaklanjuti meng	-	3	-	3	3	-	5	-	-	5	5	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	403.000.000	DISKOMINFO DAN PERSANDIAN	3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 4. Dinas Komunikasi, Infor

					Membuat dan mengirimkan surat permintaan Hasil dan Rekomendasi EPSS Tahun 2023 dan Tahun 2024 kepada Ketua Tim Pelaksana EPSS BPS melalui Kepala	Dokumen	Jumlah dokumen surat permintaan Hasil dan Rekomendasi EPSS	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	403.000.000	DISKOMINFO DAN PERSANDIAN	5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 6. Dinas Perikanan; 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga
--	--	--	--	--	--	---------	--	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--	-------------	--	-------------	---------------------------	--

						a BPS Kabupaten Kep. Meranti															Kerja; 8. Dinas Pendidikan; 9. Dinas Kesehatan; 10. Dinas Sosial P3A P2 KB		
						Melaksanakan kegiatan Penilaian Internal untuk Evaluasi Penyelenggaraan Statistik	Laporan	Jumlah laporan hasil Capaian Internal Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	402.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	403.000.000	DISKOMINFORMATIK DAN PERSANDIAN

Memp erbaik i dan mend orong siste m pelaks anaan penga daan baran g dan jaasa berba sis elektr onik	Meni ngkat nya kuali tas peng adaa n bara ng dan jasa peme rinta h, peng elola an keua ngan dan aset	Pen guat an Pen gad aan Bar ang dan Jas a Pem erint ah	Kualita s Pengel olaan Pengad aan Barang dan Jasa	Inde ks	29, 5	Melak sanak an sosiali sasi kepad a masy araka t dan stake holder terkai t pelak sanaa n PBJ	Perse ntase	Perse ntase pelak sanaa n e- tende ring	5 0	8 0	1 0 0	-	1 0 0	5 0	8 0	1 0 0	-	1 0 0	Progr am Perek onom ian dan Pemb angu nan	-	Progr am Perek onom ian dan Pemb angu nan	-	Bagian Pengad aan Barang dan Jasa Sekreta riat Daerah	Sel uru h Per ang kat Dae rah
						Melak sanak an sosiali sasi kepad a masy araka	Perse ntase	Perse ntase pelak sanaa n e- purch asing	3 0	5 5	8 0	1 0 0	1 0 0	3 0	5 5	8 0	1 0 0	1 0 0	Progr am Perek onom ian dan Pemb angu nan	-	Progr am Perek onom ian dan Pemb angu nan	-	Bagian Pengad aan Barang dan Jasa Sekreta riat Daerah	Sel uru h Per ang kat Dae rah

						t dan stakeholder terkait pelaksanaan PBJ																
						Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait pelaksanaan PBJ	Perse ntase	Persen tase pelaksanaan non e-tendering dan non e-purch asing	30	55	80	100	8	30	55	80	100	8	Program Perekonomian dan Pembangunan	- Program Perekonomian dan Pembangunan	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
						Melaksanakan sosialisasi kepada	Perse ntase	Perse ntase pelaksanaan e-kontr	30	55	80	100	8	30	55	80	100	8	Program Perekonomian dan	- Program Perekonomian dan	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Perangkat

						a masy arakat dan stake holder terkait pelaksanaan PBJ		ak								Pemb angunan		Pemb angunan		Sekre tariat Daerah	Dae rah		
						Melak sanakan koordi nasi dan asiste nsi Kepada PD dalam pengis ian SIRUP	Perse ntase	Persen tase Pagu APBD yang terinp ut pada SIRUP	100	-	-	-	8	100	-	-	8	Progr am Perrek onom ian dan Pemb angunan	- Progr am Perrek onom ian dan Pemb angunan	110.465.000	Bagian Pengad aan Barang dan Jasa Sekreta riat Daerah	Sel uruh Per ang kat Dae rah	
Meni ngkat kan jumla h apara	Meni ngkat nya kualit as peng					Mela ksakan BIMT EK PBJ	Oran g	Juml ah Apar atur PBJ yang	2	4	5	-	5	2	4	6	7	1	Progr am : Perrek onom ian dan	- Progr am : Perrek onom ian dan	197.174.000	Bagian Pengad aan Barang dan Jasa	Sel uruh Per ang kat

tur Peng adaa n bara ng dan jasa peme rinta h, peng elola an keua ngan dan aset	adaa n bara ng dan jasa peme rinta h, peng elola an keua ngan dan aset													Pemb angu nan		Pemb angu nan		Sekreta riat Daerah	Dae rah	
		Mela ksan akan BIMT EK Sertifi kasi PBJ	Oran g	Juml ah pesert a yang mend apatk an Sertif ikat PBJ	-	-	-	5 0	0	-	-	-	5 0	0	Progr am : Perek onom ian dan Pemb angu nan	-	Progr am : Perek onom ian dan Pemb angu nan	197.17 4.000	Bagian Pengad aan Barang dan Jasa Sekreta riat Daerah	Sel uru h Per ang kat Dae rah

Meningkatkan kemampuan UKPBJ yang proaktif	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset					Melaksanakan BIMTEK tingkat kematangan UKPB J	Kali	Jumlah kegiatan BIMTEK tingkat kematangan UKPB J	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	Program : Perekonomian dan Pembangunan	-	Program : Perekonomian dan Pembangunan	197.174.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
						Menyusun SOP terkait dengan proses PBJ	Dokumen	Jumlah SOP terkait proses PBJ yang tersusun	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	Program : Perekonomian dan Pembangunan	-	Program : Perekonomian dan Pembangunan	197.174.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
						Menyusun SOP terkait dengan Manajemen	Dokumen	Jumlah SOP Manajemen kinerja	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	Program : Perekonomian dan Pembangunan	-	Program : Perekonomian dan Pembangunan	197.174.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat	Seluruh Perangkat Daerah

						kinerja		yang tersusun								nan		nan		Daerah				
						Menyusun SOP terkait dengan manajemen risiko	Dokumen	Jumlah SOP manajemen risiko yang tersusun	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	Program : Perekonomian dan Pembangunan	-	Program : Perekonomian dan Pembangunan	197.174.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
						Pengembangan sistem informasi PBJ	Aplikasi/Sistem Informasi	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	Program : Perekonomian dan Pembangunan	-	Program : Perekonomian dan Pembangunan	197.174.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
Penyusunan LKPD tepat waktu,	Meningkatkan kualitas pengadaa	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan	Opini BPK	Opini	WT P	Melaksanakan koordinasi dan kolab	Perseentase	Perseentase Keseluruhan pagu angga	-	-	81	-	81	-	-	82	-	82	Program : Pengelolaan Keuangan	173.565.000.	Program : Pengelolaan Keuangan	173.156.000.	BPKAD	Seluruh Perangkat Dae

Meningkatkan Terti b admi nistr asi peng elola an Keua ngan daera h dan Meni ngkat kan Kualit as SDM pada Peng elola an Keua ngan Daer ah	n bara ng dan jasa peme rintah, peng elola an keua ngan dan aset	Aset				orasi denga n stake holde r dalam rangk a perce patan pelak sanaa n pemb angu nan strate gis berba sis digital	ran antar doku men peren canaa n dan pagu angga ran pemer intah daera h								anga n Daer ah		anga n Daer ah			rah			
						Melak sanak an koord inasi dan kolab orasi denga	Perse ntase Perse ntase penga lokasi an angga ran belanj a	-	-	1 0 0	-	8	-	-	1 0 0	-	8	Prog ram : Peng elola an Keu anga n	173.56 5.000. 000	Prog ram : Peng elola an Keu anga n	173.15 6.000. 000	BPKAD	Sel uru h Per ang kat Dae rah

					n stakeholder dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan strategis berbasis digital	dalam APBD sesuai dengan mandatory (Fungsi pendidikan, Urusan Kesehatan, urusan Infrastruktur dan SPM)									Daerah		Daerah			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

						Mempublikasikan data dan informasi tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-und	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian pelaksanaan pembangunan yang dipublikasikan		9		29		9	9	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	173.565.000.000	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	173.156.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	--	---	---------	--	--	---	--	----	--	---	---	---------------------------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------	-------	--------------------------

						ngan yang berlaku																		
						Menyusun kebijakan tentang penganggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang penganggaran pendapatan dan belanja daerah	-	-	2	2	4	-	-	2	2	4	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	173.565.000.000	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	173.156.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
						Pengendalian kas dan belanja	Persepsi	Persentase penyerap	20	25	35	20	100	20	25	35	20	100	Program : Pengelolan	173.565.000.000	Program : Pengelolan	173.156.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat

																		kat Daerah	
		Menyesuaikan tarif pajak dan retribusi	Dokumen Peraturan Perundang-undangan	Jumlah regulasi yang ditetapkan	-	-	-	1	1	-	-	-	1	Program : Pengelolaan Pendapatan	200.000.000,00	Program : Pengelolaan Pendapatan	200.000.000,00	BPKAD BAPENDANA	
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak	Laporan	Jumlah laporan Intensifikasi dan	-	-	-	-	0	-	-	1	-	1	Program :	-	Program : Pengelolaan Pen	100.000.000,00	BPKAD BAPENDANA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dan retribusi		Ekstensiifikasi pajak dan retribusi													dapatan Daerah			
Elektronifikasi penerimaan pajak dan retribusi	Laporan	Jumlah kanal pajak dan retribusi yang terdigitalisasi	-	-	-	-	0	-	-	2	-	2	Program :	-	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	BPKAD	BAPE NDA
Membrikan insentif kepada wajib pajak	Persentase	Persentase peningkatan pendapatan pajak berdasarkan jenis pajak (PBB-P2)	-	-	-	-	0	-	-	-	30	30	Program :	-	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	BPKAD	BAPE NDA

					Melak	Oran	Juml	-	-	-	-	0	4	-	-	-	4	Progr am :	-	Progr am : Penu njang Urus an Peme rinta han Daer ah Kabupaten / Kota	80.00 0.000 ,00	BPKAD	BAPE NDA
--	--	--	--	--	-------	------	------	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	---------------	---	--	-----------------------	-------	-------------

					Melaksanakan Diklat peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan	Orang	Jumlah peserta diklat Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	0	-	-	-	100	100	Program : Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.882.000.00	Program : Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.068.000.00	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
					Penyediaan Aplikasi Pengelolaan dan Pencatatan Aset Daerah, Pembiayaan dan	Kali	Pelaksanaan Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah,	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1. Program : Pengelolaan Keuangan Daerah, 2. Program :	174.776.000.000	1. Program : Pengelolaan Keuangan Daerah, 2. Program :	174.372.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah

				Evaluasi Terhadap LAPK EU SKPD dan BOS Satdik dan Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset	Pengelolaan Laporan Aset yang terintegrasi dalam Sistem Pengelolaan Aset									Pengelolaan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah					
				Penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah	Dokumen Jumlah dokumen LKPD (Laporan Keuangan Pemer	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	172.136.239.300	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	173.156.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah

					Daerah)								ah		ah										
					Melakukan penginputan data pengelolaan keuangan pada Aplikasi ipkd-bpp.kemendagri.go.id yang berkualitas dan tepat waktu	Perse ntase	Perse ntase dokumen pengelolaan keuangan yang di input	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100	Progr am : Penge lolaa n Evalu asi dan Pelap oran Pelak sana an Pemb angu nan (RFK)	112.800.000	Progr am :			-	Bagian Adminis trasi Pemerin tahan Sekreta riat Daerah	BP KA D, BAP EN DA

Meningkatkan transparansi, kesesuaian pengalokasian dan penyerapan serta aset daerah dalam pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pengadaannya, barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Penglolaan Keuangan dan Aset	Tindak lanjut rekomendasi BPK	Indeks	N / A	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Daerah	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.250.951.150	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.216.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
--	---	--	-------------------------------	--------	-------	---	---------	---------------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---------------	---	---------------	-------	--------------------------

						Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemusnahan dan penghapusan BMD (Barang Milik Daerah)	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.250.951.150	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.216.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	--	---	---------	--	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---------------	---	---------------	-------	--------------------------

					Melakukan inventarisasi dan penertiban BMD (Barang Milik Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Dokumen	Jumlah dokumen inventarisasi dan penertiban BMD	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.250.951.150	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.216.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
					Menindaklanjuti temuan BPK (Badan Pemer	Perse ntase	Perse ntase temuan BPK (Badan Pemeriksa	-	100	-	-	0	-	100	-	-	-	Program : Pengelolaan Barang	1.250.951.150	Program : Pengelolaan Barang	1.216.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah

					iksa Keuan gan) terhad ap pengel olaan BMD (Baran g Milik Daera h)		Keuan gan) yang ditind aklanj uti								Milik Daer ah		Milik Daer ah						
					Meny usun dan menya mpaik an lapora n RKBM D (Renca na Kebut uhan Baran g Milik Daera	Per an gka t dae rah	Ju ml ah dok um en RK BM D (Ren cana Kebu tuha n Bara ng Milik Daer	-	-	-	3 5	35	-	-	-	3 5	35	Prog ram : Peng elola an Bara ng Milik Daer ah	1.211. 000.0 00	Prog ram : Peng elola an Bara ng Milik Daer ah	1.216. 000.0 00	BPKAD	Sel uru h Per ang kat Dae rah

				h) tepat waktu		ah)																
				Tinda k lanjut pema nfaat an, pemin dahta ngan dan pengh apusa n BMD (Bara ng Milik Daera h)	Doku men	Jumla h Doku men pema nfaata n, pemin dahta ngan an dan pengh apusa n BMD (Bara ng Milik Daera h)	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	Prog ram : Peng elola an Bara ng Milik Daer ah	1.211. 000.0 00	Prog ram : Peng elola an Bara ng Milik Daer ah	1.216. 000.0 00	BPKAD	Sel uru h Per ang kat Dae rah

SASARAN STRATEGIS 2 : BUDAYA BIROKRASI BERAKHLAK DENGAN ASN YANG PROFESIONAL

Peny etara an jaba tan Fun gsio nal	Terw ujud nya perce pata n trans form asi jabat an fung siona l	Pen ataa n Jab ata n Fun gsio nal				Melak ukan Penye suain Jabat an Fungs ional sesuai perset ujuan Keme nteria n Dala m Negeri terha dap Jabat an funksi onal yang belum sesuai pene mpata n pada	Oran g	Juml ah Pejab at Fungs ional yang dises uaika n Jabat annya melal ui SK Bupat i	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	Progr am :		Progr am :		BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah
--	--	---	--	--	--	---	-----------	--	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---------------	--	---------------	--	------------	--

						unit kerja nya																		
Meng emba ngka n sumb er daya apara tur denga n perfor ma dan komp etensi yang tinggi	Tersel engga ran ya mana jemen talent a ASN yang efektif dan efisie n	Peng uata n Man ajem en Tale nta ASN				Penyu sunan Perat uran Bupat i tenta ng Manaj emen Talent a	Doku men	Jumla h doku men Perat uran Bupat i tenta ng Manaj emen Talent a	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	1.077. 681	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	-	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah
						Melak ukan sosiali sasi terkai t Perat uran Bupat i	Kegia tan	Juml ah pelak sana an sosial isasi terkai t Perat	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	1.077. 681	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	-	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah

					tenta ng Manaj emen Talent a		uran Bupa ti tenta ng Mana jeme n Talent a																
					Meny usun profil pegaw ai berda sarka n pemet aan talent a/ kompe tensi	Doku men	Juml ah Doku men profil pega wai	-	-	-	-	0	-	-	1	-	1	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	-	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	3.990. 000M	BKPSD	Sel uru h Per ang kat Dae rah
					Penyu sunan Peratu ran Bupat i tentan g Pedom	Doku men	Jumla h doku men Perat uran Bupat i tentan	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu	1.077. 681	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu	-	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah

					an Teknis pelaks anaan <i>Talent Pool</i> yang disus un berda sarka n pemet aan kompe tensi manaj erial dan hasil penilai an kinerj a		g Pedom an Teknis pelaks anaan <i>Talent Pool</i>								sia		sia						
					Menye diaka n lapora n inform asi	Doku men	Juml ah doku men infor masi tenta	-	-	-	-	0	-	-	1	-	1	Progr am : Penge mban gan Sumb er	-	Progr am : Penge mban gan Sumb er	2.136. 000M	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae

					tentan g kesenj angan kualifi kasi dan komp etensi pegaw ai	ng kesen janga n kualif ikasi dan komp etens i pegaw ai									Daya Manu sia		Daya Manu sia				rah
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	--	--	-----

						Melaksanak an penye lengga raa n dan mone v Diklat untu k meng atasi kesenj angan	Kegia tan	Jumla h Kegiat an Diklat	-	-	-	-	0	-	-	1	-	1	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	-	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	2.136. 000	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah
						Peny usun an Renca na Kerja imple ment asi Mana jemen Talen ta ASN	Doku men	Juml ah Doku men Renc ana Kerja imple ment asi Mana jeme n Talen ta ASN	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	0	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	-	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah

itas Manajemen Talenta kepada Pejabat Pimpinan Tinggi dan unit pengelola SDM dan/atau Tim/Kelompok Kerja		tas Manajemen Talenta																
Melakukan pengukuran (survey) untuk melihat	Perse ntase	Persen tase peningk atan penget ahuan /ka pasita	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya	0	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya	-	BKPSD M	Sel uruh Per ang kat Dae rah

at peningkataan pengetahuan/kapasitas mengenai Manajemen Talenta ASN		s peserta sosialisasi												Manusia		Manusia			
Mengidentifikasi, perumusan dan penetapan jabatan kritisal	Dokumen	Jumlah Dokumen identifikasi, perumusan dan penetapan jabatan kritisal	-	-	-	0	0	-	1	-	-	1	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah	

					Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai ketentuan untuk Jabatan Kritis dan Jabatan ASN	Dokumen	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan	-	-	-	0	0	-	1	-	-	1	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
					Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang	Dokumen	Jumlah dokumen Surat Keputusan Bupati	-	-	-	0	0	-	1	-	-	1	Program : Pengembangan Sumber Daya	-	Program : Pengembangan Sumber Daya	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah

						g Paniti a Seleks i (<i>asses sor</i> pemer intah/ ind epend en)		i Tenta ng Paniti a Selek si								Manu sia		Manu sia					
						Penye lengga raa m Siste m Infor masi Manaj emen Talent a ASN yang terint egrasi denga n Siste m Infor	Aplik asi/S iste m Infor masi	Juml sh siste m infor masi / aplik asi Mana jemen Talen ta	-	-	-	0	0	1	-	-	-	1	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	- Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	2.136. 000M	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah

masi ASN BKN																		
Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Instansi	Aplikasi/Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi / aplikasi pengembangan kompetensi	-	-	-	0	0	1	-	-	-	1	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
Penyusunan Profil Talenta yang memuat : Data personal, Kualifikasi		Jumlah dokumen Profil Talenta	-	-	-	0	0	0	1	-	-	1	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah

						Pelap oran Jabat an kritik al dan Stand ar Komp etensi Jabat an kepad a Mente ri PANR B	Dok ume n	Juml ah lapor an jabat an kritik al dan SKJ	-	-	-	0	0	0	1	-	-	1	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	-	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	2.136. 000M	BKPSD	Sel uru h Per ang kat Dae rah
						Peny usu nan anali sis kebu tuha n talenta	Dok ume n	Jumla h doku men analis i kebut uhan talenta	-	-	-	0	0	0	1	-	-	1	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	-	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	2.136. 000M	BKPSD	Sel uru h Per ang kat Dae rah

						Penyusunan strategi akuisisi berdasarkan analisis kebutuhan talenta dan ditetapkan PPK	Dokumen	Jumlah dokumen strategi akuisisi	-	-	-	0	0	0	1	-	1	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
						Melakukan peningkatan kinerja dalam kategori status kinerja	Dokumen	Jumlah dokumen identifikasi dan penilaian talenta	-	-	-	0	0	1	-	-	1	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah

					Melakukan upaya pencarian talenta atau rencana penempatan talenta dari luar instansi dalam hal dibutuhkan talenta dalam waktu cepat dan/atau dibutuhkan talenta	Dokumen	Jumlah dokumen kebutuhan talenta	-	-	-	0	0	0	1	-	-	1	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	---	---------	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	-----------	---------	--------------------------

					dengan keahlian/kompetensi tertentu																		
					Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam tahap akuisisi talenta	Dokumen	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuisisi talenta	-	-	-	0	0	-	-	1	-	1	Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia	2.136.000M	BKPSD	Seluruh Perangkat Daerah
					Melaksanakan peningkatan kompetensi	Orang	Jumlah aparatur yang mengikuti	-	-	-	0	0	-	200	200	-	400	Program : Peningkatan Sumber	-	Program : Peningkatan Sumber	2.136.000M	BKPSD	Seluruh Perangkat Daerah

						etensi talenta sesuai rencana HCD P		pelatihan/pe nge mban gan kompe tensi Aparat ur								Daya Manu sia		Daya Manu sia				rah		
						Melak sanaa kan monit oring dan evalua si dalam tahap penge mban gan dan retens i talenta	Doku men	Jumla h doku men hasil monit oring dan evalu asi penge mban gan dan retens i talenta	-	-	-	0	0	-	-	1	-	1	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	-	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	2.136.000	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah
						Meny usun Surat Keput	Doku men	Juml ah doku men	-	-	-	0	0	-	-	1	-	1	Progr am : Penge mban	-	Progr am : Penge mban	2.136.000	BKPSD M	Sel uru h Per

					usan penet apan talent a instan si berda sarka n renca na sukse si oleh PPK		surat keput usan penet apan talent a									gan Sumb er Daya Manu sia		gan Sumb er Daya Manu sia				ang kat Dae rah	
					Meny usun pene mpata n sukse sor dalam jabata n kritik al untuk menin gkatk an	Doku men	Jum lah dok ume n pene mpat an suk seso r	-	-	-	0	0	-	1	-	-	1	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	-	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	2.136. 000M	BKPSD	Sel uru h Per ang kat Dae rah

						Mela ksan akan pema ntau an dan evalu asi dala m Taha p pene mpat an Talent a	Doku men	Jumla h doku men hasil Monit oring dan evalu asi pene mpata n talenta	-	-	-	0	0	-	1	-	-	1	Progr am :	-	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	2.136. 000	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah
Meni ngkat kan peng etah uan dan keter ampil an PNS/ ASN melal ui	Tersel engga ran ya mana jemen talent a ASN yang efektif dan efisie n	-				Melak sanak an pendi dikan dan pelati han sesuai komp etensi	Kali	Pelaks anaan pendi dikan dan pelati han sesuai komp etensi	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	Progr am : Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	1.077. 681	Penge mban gan Sumb er Daya Manu sia	2.136. 000	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah
																			Progr am Kepe gawa	2.657. 600	Progr am Kepe gawa	3.990. 000		

pendidikan dan pelatihan sesuai						Menyusun Peraturan Bupati tentang Penyusunan <i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i>	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penyusunan <i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i>	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia	1.077.681	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
						Melakukan Sosialisasi terkait Peraturan	Kegiatan	Pelaksanaan sosialisasi terkait Peraturan	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Program : Peningkatan Sumber Daya	1.077.681	Program :	-	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah

						Bupati tentang penyusunan <i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i>		uran Bupati tentang penyusunan <i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i>										Manusia						
						Menyusun <i>Human Capital Development Plan (HCDP) / Rencana Pembangunan</i>	Dokumen	Jumlah dokumen <i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i>	-	-	-	-	0	-	1	-	-	1	Program :	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia	2.136. 000M	BKPSD	Seluruh Perangkat Daerah

						kapasitas SDM 2023 di seluruh Perangkat Daerah																		
Mem bang un atau mem perlu as sumb er daya dan komp etensi organ isasi untu k menc iptak an	Tersel engga ran ya mana jemen talent a ASN yang efektif dan efisie n	-				Melak sanak an koord inasi dan fasilit asi penga daan PNS dan PPPK	Kali	Pelak sanaa n koord inasi dan fasilit asi penga daan PNS dan PPPK	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	270.00 0	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	3.990. 000 M	BKPSD	Sel uru h Per ang kat Dae rah

<p>peluang atau memanfaatkannya</p>																																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Melakukan rekrutmen, seleksi dan promosi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparat ur secara berkelanjutan	Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan rekrutmen	-	-	-	-	0	-	1	-	-	1	Program :	- Program Kepegawaian Daerah	3.990.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	--	---	----------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	------------------------------	-----------	---------	--------------------------

						n (career planin g)																		
						Men yusu nan SOP Peneri maan Pegaw ai PPPK	Doku men	Doku men SOP peneri maan Pegaw ai PPPK	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	2.657. 600	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	3.990. 000	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah
Meni ngkat kan efisie nsi dan efekti fitas mana jeme n ASN yang diduk ung	Tersel engga ran ya mana jemen talent a ASN yang efektif dan efisie n	-				Menge mban gka n sistem inform asi kepeg awaia n yang sistem atis, menye luruh dan terinte	Doku men	Ju ml ah dok um en	-	-	-	-	0	-	1	-	-	1	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	-	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	3.990. 000	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah

oleh sistem manajemen kepegawaian yang valid						grasi dengan berbasis teknologi sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN																		
Mengembangkan sistem	Terwujudnya sistem	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Tingkat kualitas implementasi	Persentase	N / A	Melaksanakan pengembangan	Kali	Pelaksanaan pengembangan	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	Program Kepegawaian	0	Program Kepegawaian	3.990.000M	BKPSD	Seluruh Perangkat

m pembinaan ASN berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja	kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berprestasi	ASN	mentasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN			gan sistem pembinaan ASN berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja		sistem pembinaan ASN berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja									Daerah		Daerah			kat Daerah
--	---	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--	------------

						Menet apkan indika tor pada Perat uran Bupat i tenta ng TPP (Tamb ahan Pengh asilan Pegaw ai) di lingku ngan Pemer intah Kabu paten Kepul auan Meran ti	Doku men	Jumla h Doku men Perat uran Bupat i entan g TPP (Tamb ahan Pengh asilan Pegaw ai) di lingku ngan Pemer intah Kabu paten Kepul auan Meran ti	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	0	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	3.990. 000	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah
						Melak ukan updat	Doku men	Juml ah Doku	-	1	-	2	2	-	3	-	4	4	Progr am Kepe	0	Progr am Kepe	3.990. 000	BKPSD M	Sel uru h

ing data Anjab , ABK dan peta jabatan secara berkala		men Peta Jabat an yang di muta khirk an											gawa ian Daer ah		gawa ian Daer ah				Per ang kat Dae rah
Melakukan evaluasi jabatan	Doku men	Juml ah doku men evalua si jabat an	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	0	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	3.990. 000	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah	
Memp erbaik i penya jian data kepeg awaia n yang diperb	Doku men	Juml ah doku men data kepe gawai an	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	115.83 9.000	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	3.990. 000	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah	

					aharu i secara berkal a dan terinte grasi denga n data riway at kinerj a dan disipli n yang dikelo la oleh sistem infor masi																		
					Melak ukan updat ing data pegaw ai yang akan	Doku men	Juml ah doku men data pega wai yang akan	1	2	3	4	4	1	2	3	4	4	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	50.000 .000	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	3.990. 000M	BKPSD	Sel uru h Per ang kat Dae rah

						pensi un dalam 5 tahun kedep an diperb aharu i secara otoma tis		pensi un dala m 5 tahu n kede pan																
Pene rapa n siste m meri t	Meni ngkat nya kepat uhan terha dap siste m merit dan siste m mana jeme	Peng uata n siste m meri t	Indeks Sistem Merit	Inde ks	114 ,50	Mela ksan akan sinkr onisa si data	Lapor an	Juml ah lapor an Proye ksi kebut uhan pegaw ai Tahu nan dan 5 Tahu nan	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	Prog ram : Pen unja ng uru san pem erint ah daer ah	25.000 .000	Prog ram : Pen unja ng uru san pem erint ah daer ah	4.524. 000M	BKPSD	Sel uru h Per ang kat Dae rah

n ASN					Menyusun SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) JPT, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana	Dokumen	Jumlah dokumen SKJ (Standar Kompetensi Jabatan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.077.681.000	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
----------	--	--	--	--	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---------------	--	-----------	---------	--------------------------

						Melaksanakan Promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara <i>talent mapping</i> (melalui <i>assessment</i>)	Kegiatan	Pelaksanaan Promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara <i>talent mapping</i> (melalui <i>assessment</i>)	-	-	-	-	0	1	-	-	-	1	Program Kepegawaian Daerah	-	Program Kepegawaian Daerah	3.990.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
						Menyusun Peraturan Bupati tentang Manajemen Kinerja	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Manajemen	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	Program Kepegawaian Daerah	0	Program Kepegawaian Daerah	-	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah

						n Kinerj a																		
						Menyusun Peraturan Bupati tentang sistem penilaian kinerja ASN	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang sistem penilaian kinerja ASN	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	Program Kepegawaian Daerah	0	Program Kepegawaian Daerah	-	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
						Menyusun Peraturan Bupati tentang Reward and Punishmen	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Reward and	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Program Kepegawaian Daerah	0	Program Kepegawaian Daerah	-	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah

						t kinerj a ASN		Punis hmen t kinerj a ASN																
						Meny usun Perat uran Bupa ti tent a ng Nilai Dasa r, Kode Etik, dan Pedo man Perila ku ASN	Doku men	Juml ah doku men Perat uran Bupa ti entan g Nilai Dasa r, Kode Etik, dan Pedo man Perila ku ASN	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	0	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	-	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae rah
Mem berik an peng uata n buda	Meni ngkat nya kepat uhan terha dap	Pelak sanaa n Core Value ASN	Tingkat kemata ngan implem entasi core value	Inde ks	N / A	Mela kuka n Sosia lisasi Perat uran	Kali	Jumla h Kegiat an Sosiali sasi Peratu	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	0	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	3.990. 000	BKPSD M	Sel uru h Per ang kat Dae

<p>ya kerja ASN yang profe siona l dala m mela ksan akan tugas peker jaan</p>	<p>siste m merit dan siste m mana jeme n ASN</p>		<p>ASN BerAK HLAK</p>		<p>Bupa ti No 73 Tahu n 2021 tenta ng <i>Core Value</i> dan <i>Empl oyer Bran ding</i> ASN di lingk unga n Peme rinta h Kabu paten Kepul auan Mera nti</p>		<p>ran Bupat i No 73 Tahun 2021</p>																													<p>rah</p>
---	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

						Menyusun kode etik <i>Core Value</i> dan <i>Employer Branding</i> pada masing-masing Perangkat Daerah selaras dengan Core Value pada Kementerian/Lembaga	Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kode etik Core Value dan Employer Branding	-	-	35	-	35	-	-	-	5	Program Kepegawaian Daerah	0	Program Kepegawaian Daerah	3.990.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	--	--	------------------	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	----------------------------	---	----------------------------	-----------	---------	--------------------------

						Pembi na																		
						Menan datan gani Perny ataan /Ko mitme n dalam imple menta si <i>Core Value</i> dan <i>Emplo yer Brandi ng</i> Oleh Kepala Peran gkat Daera h	Per ang kat Da era h	Jumla h Doku men Pernya taan/ Kom itmen dalam imple menta si <i>Core Value</i> dan Emplo yer Brandi ng	-	-	-	3 5	35	-	-	-	3 5	3 5	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	0	Progr am Kepe gawa ian Daer ah	3.990. 000M	BKPSD	Sel uru h Per ang kat Dae rah

					Melakukan kampanye dalam implementasi <i>Core Value</i> dan <i>Employer Branding</i> di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui pembacaan Kode Etik <i>Core</i>	Kegiatan	Jumlah Kegiatan kampanye dalam implementasi <i>Core Value</i> dan <i>Employer Branding</i>	-	1	4	7	7	3	6	9	1	2	1	2	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	---	----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	-----------	-------	--------------------------

					Melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi indeks Ber-AKHL AK (Core Value dan Employer Branding ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan <i>Core Value</i> dan <i>Employer Branding</i> ASN	-	-	-	36	36	-	-	-	36	36	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.136.000	BKPSD M	Seluruh Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	---	------------------	---	---	---	---	----	----	---	---	---	----	----	--	---	--	-----------	---------	--------------------------

						Kepulauan Meranti																		
						Menetapkan Anggaran Perubahan di tingkat unit kerja dan tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti	Perangkit daerah	Jumlah dokumen keputusan penetapan Agen Perubahan	-	-	35	-	1	35	-	-	-	1	Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia	2.136.000M	BKPSD	Seluruh Perangkat Daerah
						Menyusun rencana aksi agen perub	Dokumen	Jumlah dokumen rencana aksi			1	2	2	1	2	3	4	4	Program : penunjang urusan peme	350.000.000	Program : penunjang urusan peme	480.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Dae

					ahan		Agen Perubahan (Unit Kerja dan Tingkat Kabupaten)									rinta han daerah kabupaten /kot a		rinta han daerah kabupaten /kot a			rah		
					Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi Agen Perubahan	Dokumen	Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi Agen Perubahan (Unit Kerja dan Tingkat Kabupaten)	1	2	3	4	4	1	2	3	4	4	Program : penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kot a	350.000.000	Program : penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kot a	480.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

						Menyusun Perubahan Peraturan Bupati tentang PNS Idola terkait pemberian reward and punishment pada penilaian kinerja ASN	Dokumen	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang PNS Idola	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	Program : -	-	Program : -	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kepatuhan terhadap	Pelaksanaan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (OMBUDSMA)	Nilai	78,82	Melaksanakan SKM (Survey	Dokumen	Laporan hasil SKM (Survey	1	2	3	4	4	1	2	3	4	4	Program : Penunjang	92.108.000	Program : Penunjang	840.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	DPMP TSP, DISD UKCA PIL, DINK

anan publik	dap sistem merit dan sistem manajemen ASN	k Prima	N)			Kepuasan Masyarakat) berbasis aplikasi pada seluruh Perangkat Daerah		Kepuasan Masyarakat)									Urusan Pemerintah Kab/Kota		Urusan Pemerintah Kab/Kota		ES, DISDI KBUD, DINSO SP3AP 2KB, UPT PUSKESMAS ALAI, UPT PUSKESMAS ANAK SETA TAH
-------------	---	---------	----	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	----------------------------	--	--

						Melaksanak an asistensi terhadap SDM pada perangkat daerah lokasi khusus (Lokus) evaluasi	Kegiatan / Peran gkat Daerah	Jumlah kegiatan asistensi	10	10	10	-	0	10	10	10	-	0		92.108.000			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	DPMP TSP, DISD UKCA PIL, DINKES, DISDIKBUD, DINSO SP3AP 2KB, UPT PUSKESMAS ALAI, UPT PUSKESMAS ANAK SETATAH
						Melaksanak an monitoring dan evaluasi standar pelaya	Dokumen / Peran gkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi stand	1	2	3	4	4	1	2	3	4	4		92.108.000				

						Melen gkapi peme nuha n saran a dan prasa rana pelay anan publi k sesua i Unda ng- unda ng Nomo r 25 Tahun 2009	Perse ntase	Pers enta se kec uku pan sara na dan pras ara na Pela yan an pub lik	-	4 0	4 0	-	4 0	-	4 0	4 0	-	4 0	Progr am : penu njang urus an peme rinta han daera h kabu paten /kot a	92.108 .000	Progr am : penu njang urus an peme rinta han daera h kabu paten /kot a	840.00 0.000		
						Melak sanak an pelaya nan publik secar a online	Aplik asi	Juml ah aplika si pelay anan publi k	-	-	-	8	0	-	-	-	9	0	Progr am : penu njang urus an peme rinta han	92.108 .000	Progr am : penu njang urus an peme rinta han	840.00 0.000	Bagian Organi sasi Sekreta riat Daerah	DPM PTSP , DISD UKC APIL

																		daera h kabu paten /kot a		daera h kabu paten /kot a			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

LAMPIRAN III
 PERATURAN
 BUPATI
 KEPULAUAN
 MERANTI NOMOR
 TAHUN 2023
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR
 5 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP
 REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 TAHUN 2020-2024

Tabel Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik
 Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023-2024

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Total Target	Target 2024				Total Target	Jenis Kegiatan (Terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit / Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	T.W. 1	T.W. 2	T.W. 3	T.W. 4		T.W. 1	T.W. 2	T.W. 3	T.W. 4				Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
tinggi tingkat kemiskinan di kabupaten kepulauan	percepatan penanganan kemiskinan	angka kemiskinan	25,5	penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik	Pujian Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	terkait	5.000.000	KBUD	BIDAN P3NF

Meranti				Pengadaan Perengkapan Siswa PAUD	Paket	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	terkait langsung dengan masyarakat khususnya peserta didik	250.000.000	DISDIBUD	BIDANG P3NF	
				Pengelolaan Dana BOS PAUD	Satuan Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOS	13	0	13	0	3	21	0	21	0	4	15	terkait langsung dengan masyarakat khususnya peserta didik	340.000.000	DISDIBUD	BIDANG P3NF
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0	0	20	0	8	25	0	0	0	0	0	terkait langsung dengan masyarakat khususnya peserta didik	199.999.000	DISDIBUD	BIDANG P3NF
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	10	10	10	0	7	10	10	10	10	10	7	terkait langsung dengan masyarakat khususnya peserta didik	22.348.000	DISDIBUD	BIDANG DIKUDAS
				Penambahan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	terkait langsung dengan masyarakat	180.000.000	DISDIBUD	BIDANG SAKFRAS	

				Penambahan ruang kelas Baru	Ruang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-	-	4	4	-	-	-	2	2	terkait langsung dengan masyarakat	100.000	KBUD	BUDANGLASARPAS
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	terkait langsung dengan masyarakat khususnya peserta didik	200.000	KBUD	BUDANGLASARPAS
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	terkait langsung dengan masyarakat khususnya peserta didik	300.000	KBUD	BUDANGLASDIKDIK
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Mene	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	terkait langsung dengan masyarakat khusus	100.000	KBUD	BUDANGLASDIKDIK

ngah Perta ma		Dana BOS												nya peserta didik			
Penamb ahan Unit sekolah Baru (USB)	Unit	Jumian Sekolah Baru yang Telah Dibang un	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	0	terkait langs u deng an mas yara kat	100.000	RISDI KBUD	BWA SARP RAS
Penamb ahan ruang kelas Baru	Kuang	Jumian Kuang Baru yang Bert amb ah	-	-	-	2	2	-	-	-	4	4	terkait langs u deng an mas yara kat	500.000	RISDI KBUD	BWA SARP RAS	
Pengad aan Perle ngkap an Sekol ah	Paket	Jumian Perle ngka pan Sekol ah yang Terse dia	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	terkait langs u deng an masyar akat khusus nya peserta didik	127.000	RISDI KBUD	BWA SARP RAS	
Penyele nggaran Proses Belajar dan Ujian bagi Pesert a Didik	Saru an Pend idika n	Jumian Satu an Pend idika n yang Menyele nggarak an	9	49	49	49	49	5	51	51	5	51	terkait langs u deng an masyar akat khusus nya peserta didik	230.000	RISDI KBUD	BWA DIKD AS	

				Proses Belajar dan Ujian														
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	kuang Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	-	-	2	2	-	-	-	3	3	terkait langsung dengan masyarakat	100.000	KBUD	BUANGSARPAS

				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	terkait langsung dengan masyarakat	1.830.000	KBUD	BIDANG SARP RAS
				Pembangunan Laboratorium	Ruang	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	-	-	2	2	-	-	-	3	3	terkait langsung dengan masyarakat	1.330.000	KBUD	BIDANG SARP RAS
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah	Unit	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	3	3	-	-	-	4	4	terkait langsung dengan masyarakat	820.000	KBUD	BIDANG SARP RAS
				Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	terkait langsung dengan masyarakat	40.000.000	KBUD	BIDANG SARP RAS

														kat				
														terkait langsung dengan masyarakat	482.147.000	PJSDI KBUD	BIDANG SARP RAS	
														terkait langsung dengan masyarakat khususnya peserta didik	500.000.000	PJSDI KBUD	BIDANG P3NF	
														terkait langsung dengan masyarakat khususnya peserta didik	134.971.000	PJSDI KBUD	BIDANG P3NF	

				Pembangunan Pelabuhan Pengu mpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengu mpan Lokal yang Dibangun	-	-	-	-	0	-	-	1	-	1	terkait langsung dengan masyarakat	199.828.000	Dinas Perhubungan	
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengu mpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengu mpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	-	-	-	-	0	-	1	3	-	3	terkait langsung dengan masyarakat	3.847.000	Dinas Perhubungan	

				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	-	-	-	-	0	-	-	1	-	1	terkait langsung dengan masyarakat	248.999.090	Dinas Perhubungan	
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Sungai dan Danau yang Dibangun	-	-	-	-	0	-	1	2	-	2	terkait langsung dengan masyarakat	200.000.000	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	terkait	100.000.000	DISEKURINDA	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaks	Gedung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	terkait	700.000.000	DISEKURINDA	

			anaan Pemb nguna n Sarana dan Prasar ana Industr i		Sinkron isasi, dan Pelaksa naan Pemban gunan Sarana dan Prasara na Industri												
			Koordi nasi, Sinkro nisasi, dan Pelaksa naan Pember dayaan Industr i dan Peran Serta Masyar akat	Pake t	Jumlah Dokum en Hasil Koordi nasi, Sinkro nisasi, dan Pelaksa naan Pember dayaan Industri dan Peran Serta Masyar akat	20 20	-	-	-	-	-	-	-	-	terkat	290.000 0.000	DISEP RINDA G

			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	terkait	3.539.869.000	Dinas Kethan Pangan Dan Pertanian	Dinas Kethan Pangan Dan Pertanian
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	LKOT	Jumlah benih/bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	1.000.000	20	-	-	-	1.000.000	30	terkait	198.000	Dinas Kethan Pangan Dan Pertanian	Dinas Kethan Pangan Dan Pertanian

			Penda mping an Pengg unaan Saran a Pendu kung Pertan ian	Lapo ran	Jumlah Pendam pingan Penggun aan Sarana Penduk ung Pertania n	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	terkat	295,74 9.000	Dina s Keta hana n Pang an Dan Perta nian	Dina s Keta hana n Pang an Dan Perta nian
--	--	--	--	-------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	-----------------	--	--

				Pengad aan Hijaua n Pakan Ternak yang Sumber nya dari Daerah Kabupa ten/Kot a Lain	Ton	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumber nya dari Daerah Kabupat en/Kota Lain	-	-	-	11 5	11 5	-	-	-	11 5	11 5	Terkait	499.99 4.000	Dina s Keta hana n Pang an Dan Perta nian	Dina s Keta hana n Pang an Dan Perta nian
				Pening katan Kualita s SDG Hewan /Tana man	Dok ume n	Jumla h pelaks anaan pening katan kualita s SDG Hewan /Tana man	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	terkait	99.987 000	Dina s Keta hana n Pang an Dan Perta nian	Dina s Keta hana n Pang an Dan Perta nian
				Pemba ngunan ,Re habilit asi dan Pemeli haraan Jalan	Unit	Jumlah usaha tani yang dibang un, direhab ilitasi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	terkait	200.00 0.000	Dina s Keta hana n Pang an Dan	Dina s Keta hana n Pang an Dan

			Usaha Tani		dan dipelihara											Pertanian	Pertanian		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Unit	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	terkait	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Unit	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	-	-	-	2	2	-	-	-	3	3	terkait	480.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	terkait	000.000.000	Dinsos, PPPA, PP KB	Fasilitator Desa

			n Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Didata													
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	750	750	750	750	850	750	750	850	750	terkait	128.486.658	Dinsos, PPPA, PP KB	Fasilitator Desa, Pendamping PKH
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	-	-	800	-	800	-	-	1000	-	terkait	100.000	Dinsos, PPPA, PP KB	Fasilitator Desa, Pendamping PKH, Bidang Sosial

				Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Keluarga	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	40	-	0	-	40	-	-	40	terkait	50.000.000	Linsos PPPA, KB	Lemba ga Kesejahteraan Sosial (LKS), Bidang Sosial
				Peningkatan Kapasitas dan Pemandangan KAT	Keluarga	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	70	-	0	-	70	-	-	70	terkait	50.000.000	Linsos PPPA, KB	Lemba ga Kesejahteraan Sosial (LKS), Bidang Sosial
				Penyediaan Perumahan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	-	-	10	-	0	-	10	-	-	10	terkait	50.000.000	Linsos PPPA, KB	Bidang Sosial, Pekerja Sosial

				an Permak nan Sesuai dengan Standar Gizi Mi nimal Kewenan gan Kabupat en/Kota														
			fasilita si Pembu atan Nomor Ind uk Kepend udukan , Akta Kela hiran, Surat Nikah, dan Kartu Iden titas Anak	Oran g Jumlah Orang yang Terpenu hi Kebutuh an Pembuat an Nomor Induk Kependu dudan, Akta Kelahira n, S urat Nikah, dan Kartu Identitas	-	5	15	-	5	-	10	20	-	20	terkait	45.000 000	linsos PPPA, KB	Bidang Sosial , Pekerj a Sosial

				Anak bagi Penyand ang Disabilit as Kewenan gan Kabupat en/Kota															
			Pemberi an Layana n Rujuka n	Oran g	Jumlan Or ang Mendap atkan Layanan Ruj ukan Kewena ngan Kabupat en/Kota	-	10	30	40	0	-	20	40	0	50	terkait	90.000 000	PPPA, KB	Bidang Sosial ' Pekerj a Sosial

Advokasi dan Pengabdian Masyarakat	Organisasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang menerima Advokasi dan Pengabdian Masyarakat	-	0	12	-	2	-	0	10	4	24	terkait	00:00	PPPA, PMD	Bidang PPPA, LKMD, dan lain-lain
Pengabdian Masyarakat	Organisasi	Jumlah Sumber Daya Manusia yang menerima Pengabdian Masyarakat	-	50	10	-	0	-	50	10	-	0	terkait	00:00	PPPA, PMD	Bidang PPPA
Pengabdian Masyarakat	MDes	Jumlah MDes yang dilakukan	5	20	44	8	8	5	50	52	9	07	terkait langsung	00:00	PMD	Bidang Desa

			Sama antar Desa															
			Fasmita Si, Eksa- saan dan Evaluasi Pening- katan Bangun- Pening- katan Desa	LND	Pusat KDB yang fasmita Si dan lam penataa- an kehidu- aan desa	6	30	10	0	0	6	30	10	0	00	kait- gung	Rp 98.8 000	FMD
			Fasmita Si, Eksa- saan dan Evaluasi Pening- katan Bangun- Pening- katan Desa	Desa	Pusat Desa KDB Evaluasi Pening- katan Desa	5	10	15	-	5	5	10	15	6	20	kait- gung	Rp 00.0 000	FMD
			Fasmita Si, Eksa- saan dan Evaluasi Pening- katan Bangun- Pening- katan Desa	Desa	Pusat Desa ASCI Pening- katan Desa	-	90	-	-	6	-	90	-	-	90	kait- gung	Rp 600. 000	FMD

				fasilita si, reaksa n dan evalua si penemu an dan pengem bangan bidang dan Usaha Milik Desa	BUMDes	Jumlah BUMDes yang difa silitasi dalam pengem bangan BUMDes	Tidak ada subkegiatan pada tahun 2022	0	15	30	2	9	07	terkait Langsu ng	999.999	PMD		
				Peraturan, pembu ngan teknis, dan pendam pingan Ekono mi Kreatif		Jumlah Orang yang mengiku hi Pelatiha n Dibidang teknis, dan Pendam pingan Ekonomi Kreatif	-	10	-	-	00	00	00	terkait langsun g ueingan masyar akat (works hop dan Fotogra fi works shop Musik)	199.999	RAPAR	bidang Pariwi sata dan Ekono mi kreatif	
				Penyedi aan Prasara na Usaha Perikaa n jangka p	unit	Jumlah Prasara na Usaha Perikaa n jangkap	00	00	00	00	00	00	00	40	Penyed iaan prasara na usaha perika an tangkap seperu alat tangkap p dan armad a kepada nelaya n secara langs ung untuk penyop timala n kegiata n penang kapan	993.000	Dinas Perika nan	bidang perika nan jangka p
				Penyedi aan Prasara na Kemdu didayaa n	unit	Jumlah Prasara na Kemdu didayaa n dalam 1 (satu)	01	23	30	01	00	00	10	20	kegiata n bidang budaya semua nya terkait	993.000	Dinas Perika nan	bidang perika nan budaya

Proses Peningkatan dan Peningkatan Kemampuan Kerja Masyarakat kompetensi	Pesa rta	Peningkatan Tenaga Agri Jayan Pelatihan Kompetensi Tani	0	0	5	20	20	00	2	8	40	40	Pelatih an ter dan Satpam	79.000	PUSA NA NER	
Pasmita Usaha Menjadi Kedua Bangun si dan han, SDM, Desain dan teknologi	Usaha	Unit Usaha yang dalam dan dan SDM, Desain dan teknologi	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	subsidi margin. bantuan pekerjaan umkm	45.000	PUSA NA NER	
Peningkatan Jalan	KM	Jalan yang tidak haraan secara Berkal	5	5	5	5	0,8	5	10	5	6	20	Rehabilitasi Jalan as Meranti	114.42	PUPR	Marga
Peningkatan Jalan	KM	Jalan yang gun	-	1	2	5	5	-	5	7	1	11	Peningkatan Jalan Membangun Desa Perisori	31.814	PUPR	Marga
Rekonstruksi Jalan	KM	Jalan yang tidak	-	4	10	14	14	-	7	5	4	21	Rekonstruksi Jalan antar	751.49	PUPR	Marga

				Akuisisi Strategis Desa	III	Pelatihan Galan Desa yang Instruks	-	-	7	-	0,7	-	1	2	3	3	Pelatihan Strategis untuk Kategori Vitas Orang dan Barang	19.000	PUPR	Marga	
				Rehabilitasi Sistem Perumahan/ Subsistem Perumahan Tempat	III	Rumahan yang Tangki Sepuk	0	10	8	8	30	0	20	48	80	80	0	Rehabilitasi Tangki Individual	9.500	PUPR	Karya Jasa Tuksi
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Desa	III	Jumlah SPAM Desa Masyarakat yang tidak ada perawatan	5	10	5	6	20	5	10	15	6	20	0	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Desa	2.000	PUPR	Karya Jasa Tuksi
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Kota	III	Jumlah SPAM Kota atau Tematik yang tidak ada perawatan	2	4	0	0	0	2	4	0	0	0	0	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Kota	21.500	PUPR	Karya Jasa Tuksi
				Rehabilitasi Sistem Perumahan/ Subsistem Perumahan Tempat		Rumahan yang Tangki Sepuk	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0		9.500	Dinas	Pelatihan Karyawan Kawasan Perumahan dan	

			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	20	-	-	20	-	3	-	-	3	terkait langsung dengan masyarakat	1.455.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Penyediaan/Selenggara
--	--	--	---	------	---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	------------------------------------	---------------	--	-----------------------

				Kenablitasi	Unit	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0	-	-	-	0	4	-	-	-	14	terkait langsung dengan masyarakat	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanian dan Lingkungan Hidup	Penyedia/Selenggara
				Pembangunan	Unit	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	-	-	-	1	4	-	-	-	4	terkait langsung dengan masyarakat	800.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanian dan Lingkungan Hidup	Penyedia/Selenggara

				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Paket	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	-	193	-	-	193	-	50	-	-	50	terkait langsung dengan masyarakat	22.595.687.640	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan Pertanian dan Lingkungan Hidup	Penyedia/Selenggara
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	Jumlah Puskesmas yang akan di rehabilitasi/ Pemeeliharaan dalam 1 tahun	-	-	1	-	1	-	3	0	0	10	Pembangunan lahan parkir dan semenisasi halaman Puskesmas Teluk Belitung Kec. Merbau	165.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan/ Bidang SDK dan Kefarmasian

				Pengelo laan Pelayan an Kesehat an Ibu Hamil	Oran g	Jumian Ibu Hamil yang Mendap atkan Pelayan an Kesehat an Sesuai Standar	-	-	-	84	84	-	-	-	454	84	90.200 000	Dinas Keseha tan	Dinas Keseh atan/ Bid ang Keseh atan Masya rakat
				Pengelo laan Pelayan an Kesehat an Ibu Bersali n	Oran g	Jumian Ibu Bersalin yang Mendap atkan Pelayan an Kesehat an Sesuai Standar	-	-	-	84	84	-	-	-	454	84	141.000 0.000	Dinas Keseha tan	Dinas Keseh atan/ Bid ang Keseh atan Masya rakat
				Pengelo laan Pelayan an Kesehat an Bayi Baru Lahir	Oran g	Jumian Bayi Baru Lahir yang Menda patkan Pelayan an Keseha tan Sesuai Standar	-	-	-	50	50	-	-	-	450	50	40.000 000	Dinas Keseha tan	Dinas Keseh atan/ Bid ang Keseh atan Masya rakat

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	1001	1001	-	-	-	701	701	Pelayanan kesehatan pada balita (terkait SPM bidang kesehatan)	40.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan/ Bidang Kesehatan Masyarakat
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	Jaminan kesehatan untuk masyarakat (pengobatan dengan KTP dan pembayaran iuran UHC)	80.489	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan/ Bidang Pelayanan Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	Penanganan stunting, kegiatan gizi kesehatan masyarakat	25.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan/ Bidang Kesehatan Masyarakat

